

# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2025-2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL .....ii

DAFTAR GAMBAR.....iii

KATA PENGANTAR ..... v

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    I.1    Latar Belakang ..... 1

    I.2    Dasar Hukum ..... 3

    I.3    Maksud dan Tujuan ..... 4

    I.4    Sistematika Penyusunan ..... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 6

    II.1    Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 6

        a.    Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah ..... 6

        b.    Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 9

        c.    Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 11

        d.    Kelompok Sasaran Layanan ..... 17

    II.2    Permasalahan Dirumuskan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ..... 18

        a.    Identifikasi Permasalahan ..... 18

        b.    Rumusan Isu Strategis ..... 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 24

    III.1    Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Tahun 2025-2029 ..... 24

    III.2    Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... 25

    III.3    Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 30

    III.4    Penyusunan Pohon Kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... 32

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENDIDIKAN ..... 38

    IV.1    Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan ..... 38

    IV.2    Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 55

    IV.3    TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN 2025-2029 ..... 61

        IV.3.1    INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ..... 61

        IV.3.2    INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)..... 62

BAB V PENUTUP.....65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta..... 9

Tabel 2 Jumlah dan Sebaran Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ..... 10

Tabel 3 Jumlah Aset Dinas Pendidikan..... 10

Tabel 4 Perbandingan Jumlah Tertampung dengan Jumlah Pendaftar Pada Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2025..... 15

Tabel 5 Jumlah Peserta Didik di Provinsi DKI Jakarta ..... 17

Tabel 6 Capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di DKI Jakarta dan Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2024 ..... 20

Tabel 7 Rumusan Isu Strategis ..... 22

Tabel 8 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta..... 24

Tabel 9 Tahapan Strategi Pembangunan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta..... 30

Tabel 10 Sinkronisasi Arah Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan)..... 31

Tabel 11 Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029.. 31

Tabel 12 Rumusan Tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 berdasarkan Isu Strategis..... 32

Tabel 13 Rumusan Sasaran Renstra Berdasarkan Critical Success Factor Tujuan Renstra..... 32

Tabel 14 Identifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya Berdasarkan Critical Success Factor Sasaran Renstra..... 34

Tabel 15 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan 2026-2030 .....62

Tabel 16 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan 2026-2030.....63

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ..... 9

Gambar 2 Capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta 2020-2024 ..... 12

Gambar 3 Capaian Rata-rata Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-202413

Gambar 4 Capaian Indeks SPM Pendidikan ..... 13

Gambar 5 Capaian Angka Partisipasi Sekolah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024... 14

Gambar 6 Capaian Literasi, Numerasi, dan Iklim di Satuan Pendidikan di Provinsi  
DKI Jakarta Tahun 2024 ..... 16

Gambar 7 Hasil Literasi Wilayah Kantong Kemiskinan DKI Jakarta ..... 19

Gambar 8 Hasil Numerasi Wilayah Kantong Kemiskinan DKI Jakarta ..... 19

Gambar 9 Persentase Capaian Literasi di Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi  
DKI Jakarta Tahun 2024 ..... 21

Gambar 10 Persentase Capaian Numerasi di Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi  
DKI DKI Jakarta Tahun 2024..... 21

Gambar 11 Jumlah Anak Tidak Sekolah Per Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2025 ..... 22

Gambar 12 Pohon Kinerja Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi DKI  
Jakarta Tahun 2025-2029..... 37

**Tim Penulis Rencana Strategis****Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2025-2029****Pengarah**

Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

**Penanggung Jawab**

Sarjoko, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

**Ketua**

Asep Erwin Djuanda, S.E. M.Si, Kepala Bidang Program dan Anggaran

**Tim Penulis**

Corry Maryana Siagian, S.Psi

Dida Dwi Prabekty, S.IP

Julia Riannisa S.I.A

Rianti Grahadiani, S.E

Zuchaeri Ecky Ramadhan, S.E

Alexandre Gazetta Bata, S. Ak

Kharina Dewi Putri, A.Md

Febriyanti Setianingsih, S.Ak

Edi Siswoyo, S.E

Lynda Pratiwi, A.Md

Ramdhan Firmansyah Dodi, A.Md.Kom.

**Tim Penyunting**

Edwien Soraya, S.Kom.



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan secara strategis dan mewujudkan visi Jakarta Kota Global. Sebagaimana diketahui bahwa setiap SKPD wajib menyusun Renstra dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jakarta Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan oleh Gubernur bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berisi antara lain tujuan, sasaran, isu strategis, strategi, arah kebijakan, indikator-indikator capaian kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor internal baik berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang dapat berpengaruh terhadap rencana yang telah ditetapkan. Proses teknokratik yang telah dilalui dengan perencanaan berbasis data menggunakan Rapor Pendidikan dan sumber data lainnya diharapkan memberikan kondisi dan gambaran riil lapangan, sehingga kebijakan yang diambil mampu dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga mempertimbangkan masukan dan pendapat dari banyak pemangku kepentingan melalui beberapa forum yang telah diselenggarakan. Penyusunan kebijakan yang *bottom-up* menjadi hal penting untuk mengajak partisipasi publik terhadap pembangunan pendidikan di DKI Jakarta. Harapan kami kiranya Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 ini, dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan setiap tahunnya dan apabila terdapat program ataupun kegiatan yang tidak tercapai atau teralokasi anggarannya pada tahun itu, kiranya dapat diprogramkan pada tahun berikutnya sesuai target yang direncanakan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 sehingga dapat selesai, tidak lupa kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Nahdiana  
NIP.196908061992012001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Indonesia Emas 2045 merupakan visi yang perlu diwujudkan dan diimplementasikan menjadi kebijakan dan program yang konkret oleh Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi. Upaya membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing membutuhkan elemen penting dalam pembangunan yaitu pendidikan. Sektor pendidikan akan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu misi (agenda) pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Transformasi Sosial, yaitu untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Langkah tersebut dilakukan dengan memastikan pendidikan berkualitas yang merata, sehingga pendidikan menjadi inklusif dan adaptif dengan kualitas dan relevansi pendidikan yang terus meningkat sesuai tuntutan global dan zaman, berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui penyediaan layanan pendidikan bermutu untuk semua.

Visi Jakarta yang ingin menjadi top 20 kota global merupakan perwujudan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk menjadi ekosistem pusat bisnis, dan kebudayaan yang menjadi epicentrum di regional ASEAN. Visi DKI Jakarta tersebut menjadi arah kebijakan yang akan ditempuh dalam 20 tahun dan telah menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2045.

Jakarta secara konsisten terus membangun sektor pendidikan untuk menciptakan SDM unggul. Hal ini tercermin dari capaian Indeks SPM Pendidikan di tahun 2024 yang mencapai kategori nilai Indeks Tuntas Madya dengan skor capaian 84,46 dan mendapat penghargaan dari Kemendikdasmen dengan capaian SPM Pendidikan Terbaik untuk Pemerintah Provinsi. Komitmen yang secara nyata terus menerus didorong untuk tujuan yang lebih besar dengan bersaing kota global lainnya.

Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan Visi Jakarta sebagai kota global pada sektor pendidikan yaitu terkait ketimpangan akses dan mutu pendidikan. Ketimpangan ini terjadi karena kondisi ekonomi yang masih menjadi gap sehingga menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan untuk menciptakan layanan pendidikan yang inklusif dan juga afirmatif.

Pendidikan merupakan tangga sosial bagi kelompok masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya. Tangga sosial pendidikan menjadi instrumen yang sangat ampuh dalam pembangunan sosial. Keberhasilan pendidikan akan meningkatkan kualitas diri manusia baik secara kognitif, afektif, psikomotorik maupun spiritual dan akan mengembangkan secara komprehensif kompetensi akademik, sosial dan kreativitas.

Pendidikan juga telah menjadi hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara sebagai kewajiban. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 2 Tahun

2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Undang-undang (UU) Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta secara konsisten terus membangun sektor pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan pada tahun 2024 yang sudah mencapai 84,46 dan mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dengan capaian SPM Pendidikan Terbaik untuk Pemerintah Provinsi. Capaian ini menjadi modal penting untuk menjadi fondasi transformasi sektor pendidikan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 5 (lima) tahun kedepan. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, mempunyai kewenangan urusan konkuren pendidikan untuk mengatur Pendidikan Jenjang, Dasar, Menengah, Pendidikan Khusus, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan.

Terdapat isu-isu penting yang perlu diselesaikan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam sektor pendidikan diantaranya berupa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi melalui pendidikan berkualitas sebagai dukungan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada Tahun 2045 yang perlu diimplementasikan menjadi kebijakan dan program yang konkrit. Sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi melalui pendidikan berkualitas juga harus linear dengan visi Jakarta pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2045 yang ingin menjadi top 20 kota global, dengan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk menjadi ekosistem pusat bisnis, dan kebudayaan yang menjadi epicentrum di regional ASEAN.

Isu penting lainnya yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada sektor pendidikan adalah ketimpangan akses dan mutu pendidikan yang terjadi karena kondisi ekonomi yang masih menjadi gap bagi masyarakat miskin untuk menikmati pelayanan pendidikan secara optimal. Pendidikan sebagai tangga sosial bagi kelompok masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya, menjadi instrumen yang sangat ampuh dalam pembangunan sosial. Pendidikan yang juga telah menjadi hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara sebagai suatu kewajiban, sehingga menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan untuk menciptakan layanan pendidikan yang inklusif dan juga afirmatif.

Renstra mengidentifikasi isu-isu strategis di bidang pendidikan melalui analisis permasalahan dan tugas fungsi dinas, kemudian menjabarkan rencana program kegiatan untuk mengatasi isu-isu tersebut dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Melalui pendekatan secara holistik dan mengedepankan sinergi antar unsur pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan segala isu-isu pada



sektor pendidikan, Dinas Pendidikan mengharapkan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk menerjemahkan, mempertajam dan menyempurnakan pembangunan pendidikan serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan selama periode tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis Dinas Pendidikan disusun dengan berprinsip secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renstra akan membantu Dinas Pendidikan mengarahkan upaya-upaya penyelesaian isu pendidikan melalui perencanaan yang terstruktur dan pelaksanaan program yang terarah.

## **I.2 Dasar Hukum**

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Undang-undang (UU) Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- l. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- m. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044;

- n. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045;
- o. Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk tersedianya pedoman arah pembangunan pendidikan bagi semua tingkatan pengelolaan pendidikan di DKI Jakarta dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pendidikan, dan juga sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja SKPD, kontrak kinerja kepala SKPD dengan Gubernur, serta monitoring dan evaluasi hasil kinerja SKPD.

### **I.4 Sistematika Penyusunan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bagian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menguraikan gambaran umum penyusunan Renstra yang terdiri dari dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

##### **PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dijabarkan kondisi eksisting pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah. Tujuannya adalah untuk mengetahui titik awal perencanaan yang akan dibuat untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Fokus bab ini adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah yang ditinjau dari kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, kemampuan perangkat daerah dalam mendukung visi, misi dan program kepala daerah, program dan target pemerintah pusat, dan RTRW yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan perangkat daerah. Permasalahan-permasalahan digunakan sebagai bahan untuk merumuskan isu-isu strategis perangkat daerah.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Isu-isu strategis yang telah dirumuskan menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis perangkat daerah dan menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan terwujud pada lima tahun yang akan datang.

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan

program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

#### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

##### PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program yang digunakan dalam dokumen Renstra telah tercantum dalam RPJMD. Bagian ini mengemukakan indikator perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

#### BAB V PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen Renstra yang telah disusun.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan;
2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan;
3. perumusan dan pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pendidikan;
4. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
6. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
7. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
8. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang pendidikan;
9. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan satuan pendidikan;
10. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan;
11. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
12. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pendidikan;
13. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang pendidikan;
14. pelaksanaan perencanaan, pembangunan baru/rehab total/rehab berat/rehab sedang/rehab ringan sarana dan prasarana kerja pendidikan;
15. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan; dan
16. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan memiliki kedudukan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan

2. Kepala Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
4. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh Wakil Kepala Dinas Pendidikan.
5. Wakil Kepala Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Wakil Kepala Dinas Pendidikan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Dinas.
7. Dinas Pendidikan berada di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terdiri atas:

1. Sekretariat Dinas Pendidikan, terdiri atas:
  - a) Subbagian Umum;
  - b) Subbagian Keuangan; dan
  - c) Subbagian Manajemen Aset.
2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
3. Bidang Sekolah Dasar yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
4. Bidang Sekolah Menengah Pertama yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
5. Bidang Sekolah Menengah Atas yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
6. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
7. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
  - a) Seksi Pendidik; dan
  - b) Seksi Tenaga Kependidikan.
8. Bidang Program dan Anggaran;
9. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi, terdiri atas:
  - a) Subbagian Tata Usaha;
  - b) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus; Seksi Sekolah Dasar;
  - c) Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
  - d) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan; dan
  - e) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
10. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
  - a) Subbagian Tata Usaha;
  - b) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus dan Sekolah Dasar; dan
  - c) Seksi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan.
11. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
  - a) Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan yang membawahi Subbagian Tata Usaha;



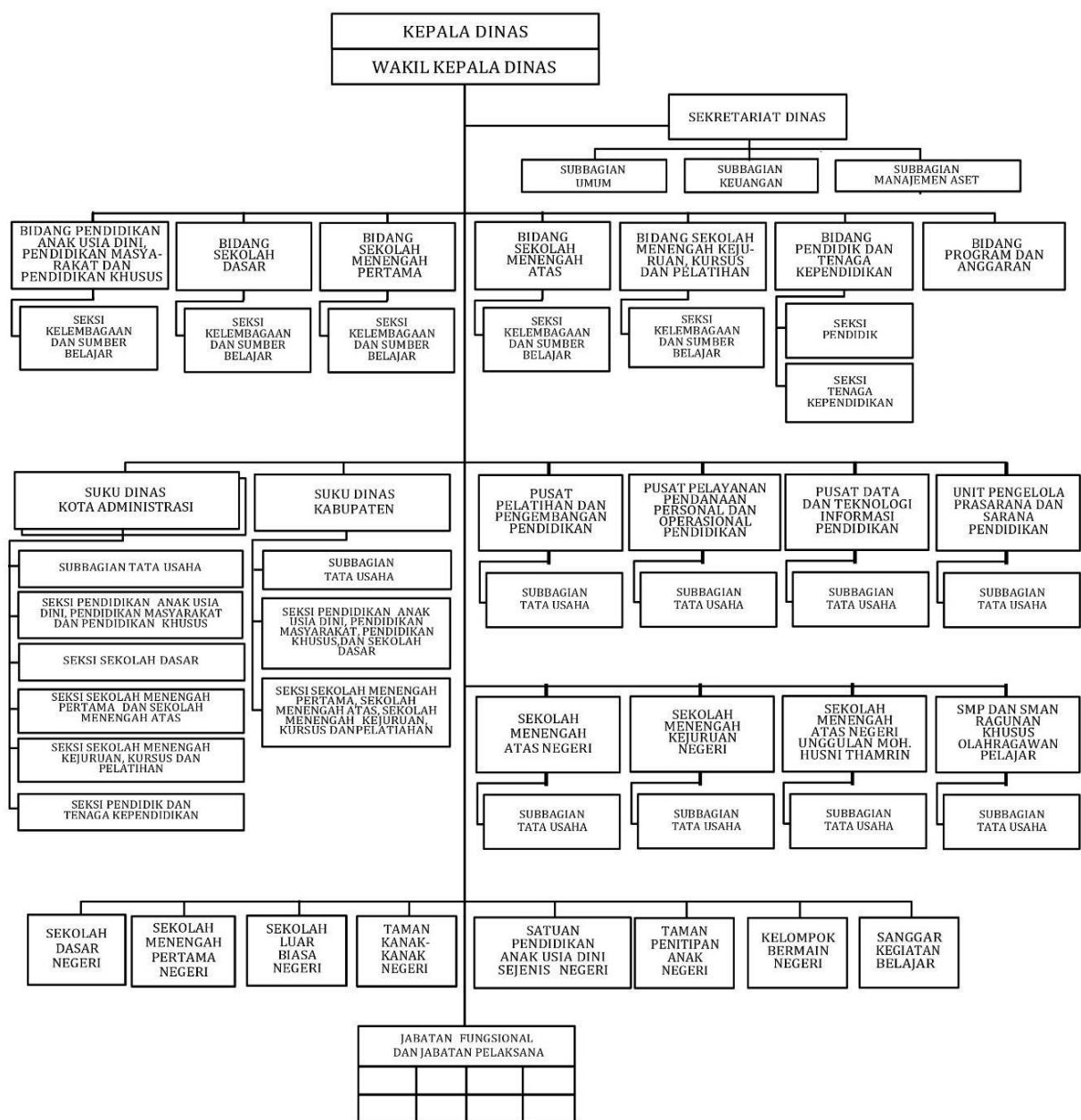
- b) Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- c) Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- d) Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- e) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri, terdiri atas:
  - 1) Taman Kanak-Kanak Negeri;
  - 2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri;
  - 3) Taman Penitipan Anak Negeri; dan
  - 4) Kelompok Bermain Negeri.
- f) Sekolah Dasar Negeri;
- g) Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- h) Sekolah Menengah Atas Negeri yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- i) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- j) Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- k) Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- l) Sekolah Luar Biasa Negeri; dan
- m) Sanggar Kegiatan Belajar.

#### 12. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pada Dinas Pendidikan dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri atas:

1. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang;
2. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan pada Suku Dinas Pendidikan Kota;
3. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis; dan
4. Pelaksana Tata Usaha pada Satuan Pendidikan.

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta



b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sejak diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan serta dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, pembinaan urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang memiliki sumber daya sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

SKPD/UKPD	JUMLAH
DINAS PENDIDIKAN	
Kepala Dinas	1
Wakil Kepala Dinas	1
Sekretariat	50
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus	15

SKPD/UKPD	JUMLAH
Bidang Sekolah Dasar	17
Bidang SMK, Kursus, dan Pelatihan	16
Bidang SMA	13
Bidang SMP	10
Bidang Program dan Anggaran	13
Bidang PTK	32
<b>Total</b>	<b>168</b>

Sumber data dan Cut Off: Dinas Pendidikan, Mei 2025

Tabel 2 Jumlah dan Sebaran Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Wilayah	PENDIDIK			TENAGA KEPENDIDIKAN			KEPALA SEKOLAH	PAMONG	PENGAWAS	PENILIK	JUMLAH
	GURU ASN		KKI	TENDIK ASN		KKI					
	PNS	PPPK		PNS	PPPK						
Dinas Pendidikan				157	6			0	25	2	190
Jakarta Barat	3141	3251	1195	186	0	1733	352	4	14	6	9.882
Jakarta Pusat	2.143	1.805	749	146	0	1.068	207	5	6	3	6.132
Jakarta Selatan	4.275	3,41 6	1.320	326	0	1.894	349	5	16	10	11.611
Jakarta Timur	5.975	5.255	2.175	388	0	3.043	496	5	12	8	17.357
Jakarta Utara	2.091	2.400	893	147	0	1.241	191	3	13	6	6.985
Kepulauan Seribu	109	148	127	17	0	118	26	1	1	1	548
Pusdatindik				13	0						13
UPT Prasardik				25	0						25
P4OP				11	0						11
P4 Barat				10	0						10
P4 Pusat				8	0						8
P4 Selatan				13	0						13
P4 Timur				9	0						9
P4 Utara dan Kep. Seribu				9	0						9
Jumlah				17.734	16.275						6.459
	34.009		40.468	1.471		10.568					

Sumber data dan Cut Off: Dinas Pendidikan, Mei 2025

Dinas Pendidikan memiliki aset di setiap unit kerja sebagai berikut:

Tabel 3 Jumlah Aset Dinas Pendidikan

No	Wilayah	Total					
		KIB A	KIB B	KIB C	KIB D	KIB E	KIB F
1	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat	80	74.917	243	2	293.555	1
2	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat	105	75.852	257	2	294.709	-
3	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Utara	80	54.237	250	-	345.730	-
4	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara	104	102.951	338	2	459.977	-
5	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat	143	91.148	494	-	223.357	1

No	Wilayah	Total					
		KIB A	KIB B	KIB C	KIB D	KIB E	KIB F
6	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat	150	106.463	480	-	197.961	-
7	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan	186	120.786	626	-	192.825	-
8	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan	186	99.952	634	1	431.257	-
9	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur	281	367.726	1.006	1	1.069.933	-
10	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Timur	208	192.700	1.141	-	1.573.165	-
11	Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu	32	12.951	78	-	9.352	-
12	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	2.473	11	3	909	-
13	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Barat	-	1.764	8	1	-	-
14	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Selatan	1	1.489	8	2	163	-
15	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Utara dan Kepulauan Seribu	1	1.696	18	2	-	-
16	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Jakarta Timur	1	2.074	1	-	20	-
17	Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan	1	656	-	-	1	-
18	Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan	-	395	-	-	-	-
19	Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin	1	714	17	2	-	-
20	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta	1	1.822	12	-	2.896	-
21	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta	1	2.205	-	-	4.087	-
22	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta	1	1.433	23	-	1.871	-
23	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 13 Jakarta	1	1.278	19	-	3.037	-
24	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta	1	3521	13	-	206	-
25	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 20 Jakarta	1	876	5	-	7	-
26	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta	1	844	1	-	525	-
27	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 26 Jakarta	1	6.878	30	3	6.670	-
28	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta	-	4.394	16	-	8.316	-
29	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 51 Jakarta	-	4.329	12	-	5321	-
30	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 37 Jakarta	1	1.177	-	-	1.019	-
31	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 33 Jakarta	-	223	4	-	137	-
32	Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan	-	90.080	309	-	-	218
Total		1.570	1.430.004	6.054	21	5.127.006	220

Sumber: Dinas Pendidikan

### c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam evaluasi sistem pendidikan pada satuan pendidikan dan pemerintah daerah telah menggunakan Rapor Pendidikan

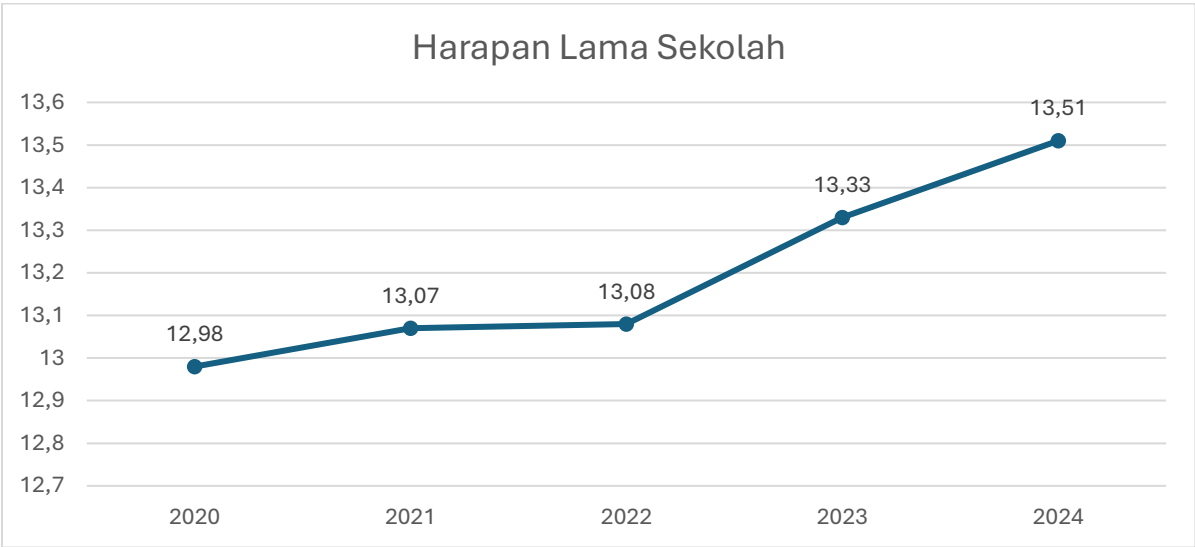
sebagai platform evaluasi sistem pendidikan. Hal ini sudah sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 dan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 yang menjelaskan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan yang mengukur angka partisipasi sekolah, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, iklim kebinekaan, iklim inklusivitas, dan iklim keamanan.

Selain itu Indikator kinerja utama Dinas Pendidikan merupakan turunan dari Indikator Indeks Modal Manusia (IMM) yaitu Indeks Dimensi Pendidikan (IDP). IMM dan IDP merupakan indikator yang baru digunakan pada RPJMN 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029. Pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan (IUP), terdiri atas:

- 1. Harapan Lama Sekolah;
- 2. Persentase Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi;
- 3. Rata-rata Lama Sekolah;
- 4. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi;
- 5. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi;
- 6. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi.

Hasil evaluasi harapan lama sekolah di DKI Jakarta sejak tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup baik dan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2 Capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta 2020-2024

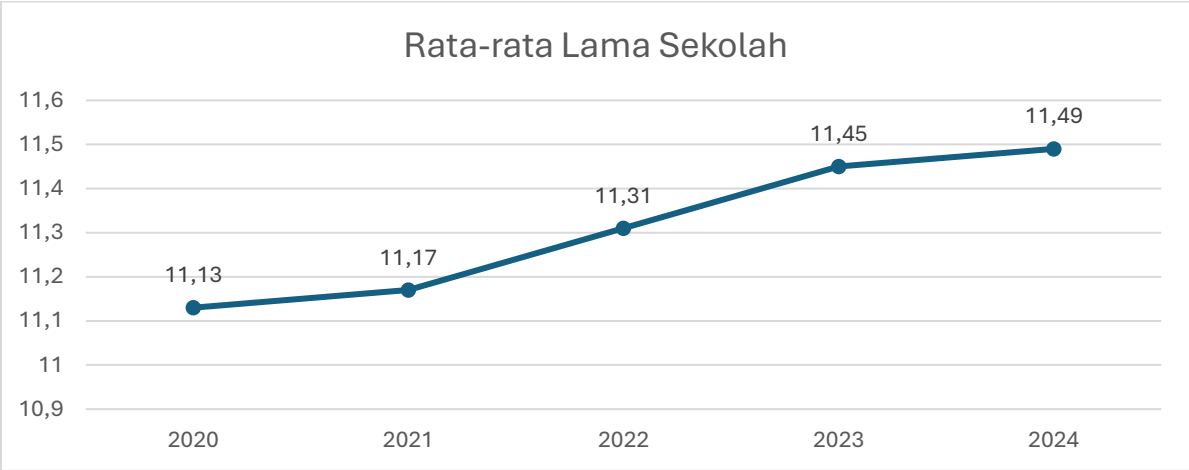


Sumber: Badan Pusat Statistik

Sejak tahun 2020 sampai 2024 angka harapan lama sekolah di DKI Jakarta telah naik secara konsisten. Hal ini merupakan cermin keberhasilan perluasan akses pendidikan di DKI Jakarta. Selain itu, hasil dari perluasan akses pendidikan juga terlihat melalui capaian rata-rata lama sekolah yang ditunjukkan sesuai grafik di bawah ini.



Gambar 3 Capaian Rata-rata Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024

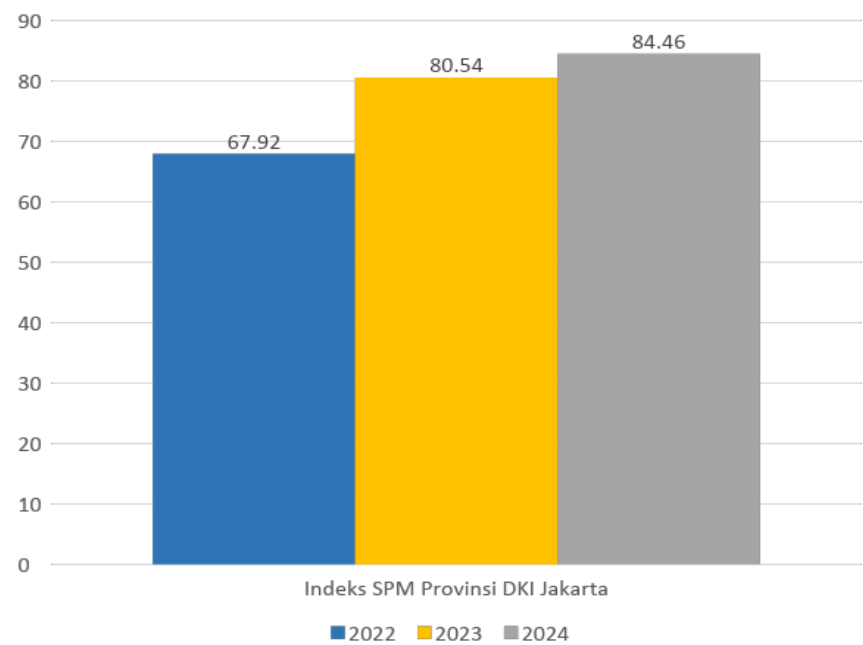


Sumber: Badan Pusat Statistik

Rata-rata lama sekolah di DKI Jakarta juga mengalami kenaikan yang konsisten, meskipun wajib belajar 12 tahun belum tercapai di DKI Jakarta atau setara tingkat SMA kelas 2. Keberhasilan peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah terjadi karena konsisten kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan melalui program KJP Plus, KJMU, pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, dan SPMB Bersama. Keberlanjutan program KJP Plus dapat menjaga anak-anak miskin putus sekolah, dan program KJMU dapat mendorong anak-anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi sehingga mendorong peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan diakumulasi menjadi indeks SPM Pemerintah Daerah. Indeks SPM Provinsi DKI Jakarta urusan pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 4 Capaian Indeks SPM Pendidikan



Sumber: Rapor Pendidikan

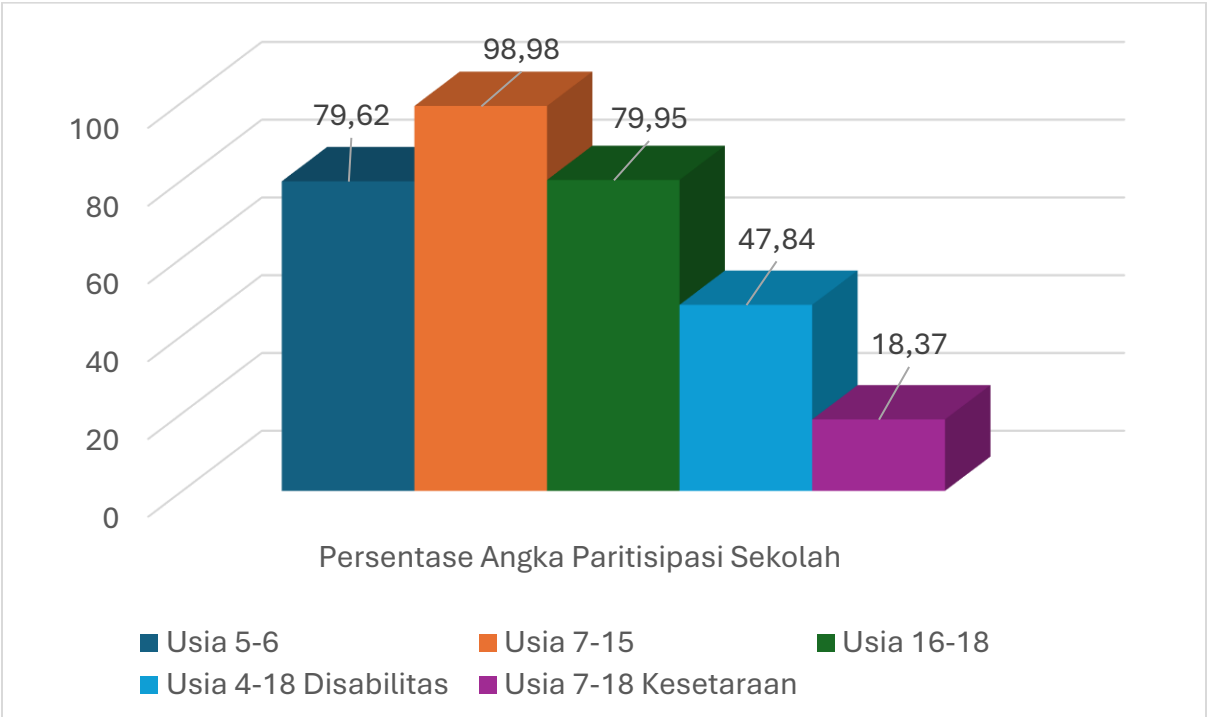
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indeks SPM terus meningkat setiap tahunnya sejak pertama kali penilaian ini dilakukan pada tahun 2022. Secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencapai kategori Tuntas Madya dalam penilaian SPM Pendidikan.

Untuk urusan pendidikan, indeks SPM terdiri dari beberapa indikator utama untuk menilai pencapaian kinerja pemerintah daerah. Indikator SPM Urusan Pendidikan terdiri dari:

- 1. Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS);
- 2. Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS);
- 3. Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS);
- 4. Jumlah warga negara usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS);
- 5. Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS);
- 6. Tingkat penyerapan lulusan SMK;
- 7. Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK;
- 8. Rata-rata kompetensi Literasi SD, SMP, SMA, SMK dan SLB berdasarkan Asesmen Nasional;
- 9. Rata-rata kompetensi Numerasi SD, SMP, SMA, SMK, SLB berdasarkan Asesmen Nasional;
- 10. Indeks Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

Hasil capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 5 Capaian Angka Partisipasi Sekolah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Rapor Pendidikan

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian yang sudah di atas 95% adalah untuk APS usia 7-15 tahun yang artinya 98,98% anak pada usia tersebut telah duduk pada bangku jenjang SD dan SMP. Sementara untuk capaian usia 5-6 tahun dan 16-18 tahun masih perlu intervensi kebijakan peningkatan dan perluasan akses pendidikan. Untuk anak usia 4-18 tahun disabilitas, angka yang masih cukup kecil terdapat penjelasan bahwa metode yang digunakan oleh BPS adalah dengan sampel bukan populasi sehingga yang dilakukan survei relatif lebih kecil dan angka yang ditunjukkan tidak sepenuhnya mencerminkan fakta di lapangan sehingga sebenarnya Dinas Pendidikan dapat melakukan pendataan secara mandiri untuk akurasi data capaian. Untuk anak usia 7-18 di pendidikan kesetaraan, baru mencapai 18,37% karena banyak anak yang putus sekolah namun enggan untuk melanjutkan pada PKBM.

Belum tercapainya angka partisipasi sekolah pada semua jenjang dengan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak sekolah yang masih tinggi, karena tidak semua ATS dapat di intervensi dengan KJP Plus. Berdasarkan hasil kajian masih tingginya ATS karena penanganan yang dilakukan belum komprehensif dan tepat dalam melakukan intervensi. Faktor anak tidak sekolah selain faktor ekonomi antara lain bullying, bekerja secara sadar, eksploitasi anak, dan pernikahan anak, faktor-faktor tersebut tentu tidak bisa hanya di intervensi oleh KJP Plus karena penyelesaiannya harus berdasarkan akar masalah, sehingga dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak mampu menyelesaikan sendiri, butuh kolaborasi dengan stakeholder lain. Faktor gagalnya mencapai APS 100% salah satunya juga terbatasnya daya tampung negeri khususnya jenjang SLB, SMP, SMA, dan SMK. Preferensi masyarakat untuk mendaftar disekolah negeri salah satunya karena mutu yang terjamin dan gratis menyebabkan jumlah yang mendaftar dan yang tertampung tidak sesuai, hal ini bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Perbandingan Jumlah Tertampung dengan Jumlah Pendaftar Pada Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2025

No	Jenjang	Jumlah Pendaftar	Jumlah Tertampung
1	SMP	224.528	72.259
2	SMA	122.588	29.852
3	SMK	70.614	19.984
4	SLB	1.564	928

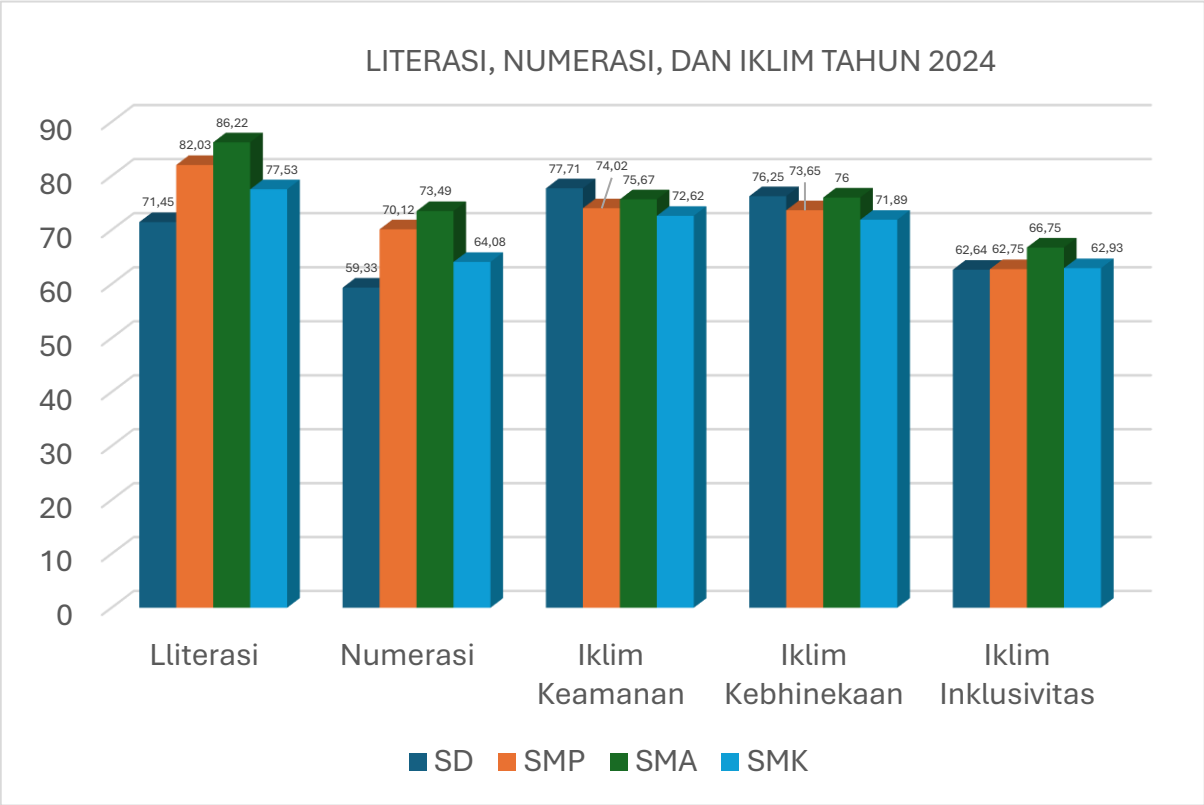
Sumber: Dinas Pendidikan

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan jumlah anak yang tidak tertampung yang ingin bersekolah di satuan pendidikan negeri mencapai 296.271 anak, dan anak tersebut akan mencari satuan pendidikan swasta dan berpotensi putus sekolah.

Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat mewujudkan kemajuan negara. Peningkatan kualitas pendidikan di berbagai jenjang masih perlu diupayakan dengan peningkatan kualitas kurikulum, model pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sistem penilaian yang tepat, serta sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang memadai. Kualitas pendidikan juga perlu didukung dengan fasilitasi pembelajaran secara digital dengan memanfaatkan teknologi. Upaya yang dilakukan telah dapat mendorong perbaikan pembelajaran, yang antara lain ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar peserta didik (learning outcome).

Capaian hasil pembelajaran, yang diukur melalui kemampuan literasi, dan numerasi, serta mengukur iklim pada satuan pendidikan, capaiannya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 6 Capaian Literasi, Numerasi, dan Iklim di Satuan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Rapor Pendidikan

Berdasarkan data di atas bahwa capaian literasi, dan numerasi pada jenjang SD masih lebih rendah dibanding pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Berdasarkan hasil evaluasi untuk literasi dan numerasi masih terdapat kesenjangan mutu pada satuan pendidikan, sehingga masih banyak satuan pendidikan SD yang memiliki mutu rendah dan mengakibatkan rendahnya capaian literasi dan numerasi. Sedangkan untuk iklim keamanan, iklim kebhinekaan secara capaian sudah cukup merata pada semua jenjang. Khusus untuk iklim inklusivitas masih cukup rendah merata pada semua jenjang, hal ini menjelaskan bahwa di satuan pendidikan masih belum inklusif untuk peserta didik kebutuhan khusus yang dikarenakan tidak adanya guru pendamping (shadow teacher), kurangnya guru pembimbing khusus, serta sarana dan prasarana belum sesuai secara kuantitas dan belum mengakomodir kebutuhan disabilitas.

Pada konteks ketimpangan Gender, secara umum jika melihat data ketimpangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu timpang, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam memberikan layanan akses pendidikan. Namun memang masih terdapat ditemukan kasus anak perempuan yang putus sekolah disebabkan lingkungan keluarga yang tidak mendukung anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan, hal ini ditemui pada anak-anak dari keluarga miskin. Data mengenai jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5 Jumlah Peserta Didik di Provinsi DKI Jakarta

No	Suku Dinas Pendidikan	Peserta Didik Laki-Laki	Peserta Didik Perempuan	Total Peserta Didik	% Peserta Didik Laki-Laki	% Peserta Didik Perempuan
1	Jakarta Barat I	95.601	90.890	186.491	51%	49%
2	Jakarta Barat II	83.375	77.961	161.336	52%	48%
3	Jakarta Pusat I	38.444	38.265	76.709	50%	50%
4	Jakarta Pusat II	46.229	43.596	89.825	51%	49%
5	Jakarta Selatan I	95.746	91.477	187.223	51%	49%
6	Jakarta Selatan II	81.558	78.677	160.235	51%	49%
7	Jakarta Timur I	137.605	129.754	267.359	51%	49%
8	Jakarta Timur II	118.911	113.438	232.349	51%	49%
9	Jakarta Utara I	58.755	56.356	115.111	51%	49%
10	Jakarta Utara II	70.734	66.423	137.157	52%	48%
11	Kepulauan Seribu	3.189	2.909	6.098	52%	48%
	Total	830.147	789.746	1.619.893	51%	49%

Sumber : Data Pokok Pendidikan per 1 September 2025.

Proporsi peserta didik Laki-Laki dan Perempuan yang mendapatkan layanan pendidikan dengan merujuk data pada Tabel 5 bahwa selisih persentase antara peserta didik laki-laki dan perempuan hanya berkisar 1%-2% pada Satuan Pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mendapatkan pelayanan pendidikan telah merata antar gender di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.

**d. Kelompok Sasaran Layanan**

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara urusan pendidikan yang merupakan wewenang pemerintah daerah memiliki mitra stakeholder yang sesuai dengan kewenangannya. Dinas Pendidikan bermitra dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi DKI Jakarta. BPMP Provinsi DKI Jakarta merupakan unit pelaksana teknis yang membantu pendampingan dan advokasi kebijakan Kemdikdasmen agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dalam melaksanakan kebijakan pendidikan.



Mitra lainnya dari lembaga non pemerintah yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan meliputi Smeru Institute, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Makara Universitas Indonesia, Article 33 yang membantu Dinas Pendidikan dalam merumuskan kebijakan strategis pendidikan.

Pada kelompok sasaran layanan yang dilayani oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yaitu terdiri dari anak usia sekolah dan warga negara yang belum bersekolah. Ujung tombak layanan pendidikan pada satuan pendidikan dan pemberi layanan adalah pendidik dan tenaga kependidikan.

## **II.2 Permasalahan Dirumuskan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **a. Identifikasi Permasalahan**

Berdasarkan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan telaah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta tahun 2022-2042 permasalahan pendidikan di DKI Jakarta yaitu ketimpangan akses pendidikan dari kelompok miskin. Ketimpangan akses pendidikan pada kelompok miskin khususnya pada wilayah pesisir Jakarta Utara, menurut laporan KLHS pendidikan dapat memicu kesadaran sosial akan pentingnya menjaga lingkungan yang berkelanjutan yang juga pada wilayah pesisir rawan terhadap bencana iklim.

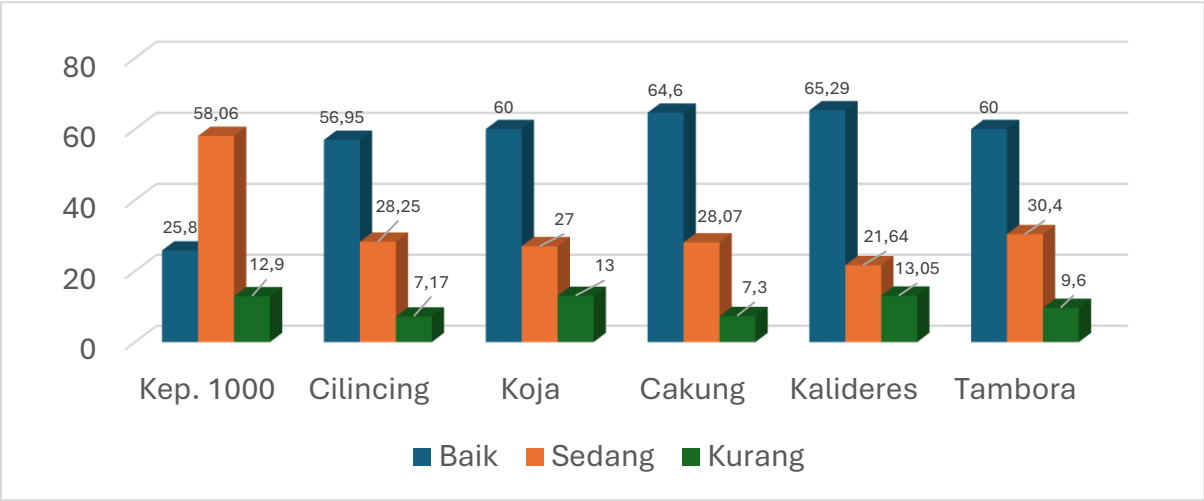
Berdasarkan hasil telaah RPJMN dan Renstra Kemdikdasmen, permasalahan pendidikan yang menjadi perhatian dari Pemerintah yaitu

1. Partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD dan jenjang pendidikan menengah belum optimal yang secara nasional baru mencapai 63,81%. Sementara untuk di DKI Jakarta hal ini juga masih permasalahan dimana data menunjukkan masih berada pada angka 79,62%
2. Tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah usia 16 (enam belas) - 18 (delapan belas) tahun yang mencapai 2.481.822 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua) orang. Jumlah ATS yang masih besar ini, dikarenakan aspek ekonomi dan sosial budaya dalam menjangkau layanan pendidikan, serta belum optimalnya pendataan, penjangkauan, pendampingan, dan penyediaan pola layanan pendidikan yang tepat bagi ATS. Hal ini juga senada terjadi pada Provinsi DKI Jakarta dimana angka ATS masih cukup tinggi
3. Skor rerata Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi minimum bidang numerasi masih belum optimal terutama pada jenjang SMA/ sederajat, hal ini juga terjadi pada Provinsi DKI Jakarta, bahwa mayoritas nilai AKM kecil terjadi pada satuan pendidikan swasta
4. Hasil capaian lingkungan belajar yang ditunjukkan dari capaian Iklim Keamanan Sekolah, Iklim Kebinekaan Sekolah, Iklim Inklusivitas Sekolah, dan Indeks Karakter secara umum masih belum mencapai angka 75 (tujuh puluh lima) pada seluruh jenjang. Hal ini juga dialami oleh Provinsi DKI Jakarta bahwa pada seluruh jenjang masih rata-rata dibawah 75.
5. Kurangnya dukungan psikologis serta belum optimalnya pembentukan pemahaman dari guru menjadi salah satu yang perlu menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini juga terjadi bahwa dukungan psikologis dari guru BK khususnya belum mampu mengoptimal kualitas

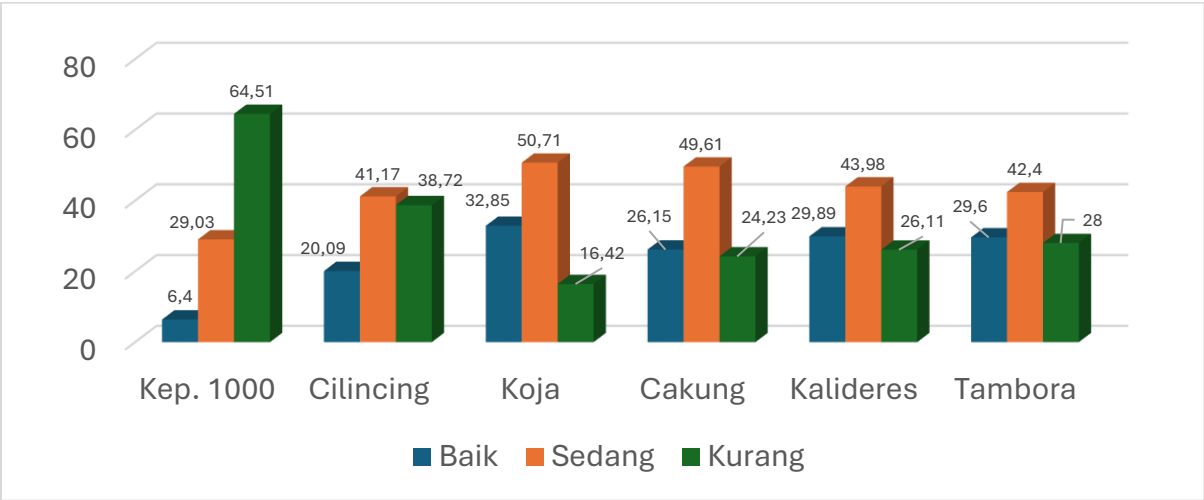
pembelajaran peserta didik bahkan pada semangat untuk menempuh pendidikan selanjutnya.

6. Terdapat ketimpangan dalam literasi, numerasi, dan karakter peserta didik yang perlu ditingkatkan melalui inovasi pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidik berdasarkan hasil asesmen nasional. Di Provinsi DKI Jakarta ketimpangan wilayah terjadi antara Kabupaten Kepulauan Seribu dengan wilayah kota administrasi lainnya, selain itu jika dibreakdown pada setiap kecamatan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi yang timpang terjadi pada kecamatan yang memiliki kantong kemiskinan yang cukup besar seperti pada kecamatan cilincing, koja, cakung, kalideres, dan tambora. Sementara wilayah yang sedikit kantong kemiskinan memiliki capaian hasil belajar lebih baik seperti kecamatan kembangan, kebon jeruk, kemayoran, menteng, pesanggrahan, dan cipayung. Secara data dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 7 Hasil Literasi Wilayah Kantong Kemiskinan DKI Jakarta



Gambar 8 Hasil Numerasi Wilayah Kantong Kemiskinan DKI Jakarta



Sumber: Rapor Pendidikan

7. Masih banyaknya satuan PAUD yang belum terakreditasi, data sampai dengan tahun 2024 hanya sekitar 62,12% (enam puluh dua koma dua belas persen) satuan PAUD yang telah terakreditasi baik (akreditasi A atau B). Pada capaian Rapor Pendidikan Dinas Pendidikan, hasil serupa juga ditemui, bahkan lebih

rendah dari capaian nasional, angka PAUD yang baru terakreditasi minimal B baru mencapai 59,04%

- Proses pembelajaran dan kurikulum pendidikan vokasi tidak sesuai (atau tidak mengikuti perkembangan global), sehingga kualitas lulusan vokasi tidak dapat diterima di dunia usaha/dunia industri secara optimal. Hal ini terjadi di DKI Jakarta dengan masih terdapat SMK yang belum mengoptimalkan kerja dengan DUDI, baru hanya sebatas MoU tapi belum dilaksanakan secara lebih lanjut kerja sama yang telah disepakati.
- Dukungan pendidikan vokasi (kursus dan pelatihan) bagi peserta didik disabilitas belum optimal. Hal tersebut diperlukan agar peserta didik disabilitas akan mampu mandiri dan berwirausaha karena sulit mendapatkan pekerjaan di bidang formal.

Secara kinerja pelayanan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta memang mengalami peningkatan jika dilihat pada Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, namun jika dilihat pada masing-masing capaian Kabupaten/Kota masih terdapat masalah ketimpangan pada wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu. Data capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dari masing-masing wilayah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6 Capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di DKI Jakarta dan Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2024

Provinsi / Kabupaten/Kota Administrasi	Harapan Lama Sekolah (HLS) Peserta Didik Laki-Laki	Harapan Lama Sekolah (HLS) Peserta Didik Perempuan	Rata-Rata Harapan Lama Sekolah
DKI Jakarta	11,83	11,19	11,49
Kota Jakarta Selatan	12,38	11,7	12,04
Kota Jakarta Timur	12,3	11,83	12,065
Kota Jakarta Pusat	11,83	11,4	11,615
Kota Jakarta Barat	11,65	10,83	11,24
Kota Jakarta Utara	11,34	10,43	10,88
Kabupaten Kepulauan Seribu	9,57	8,96	9,26

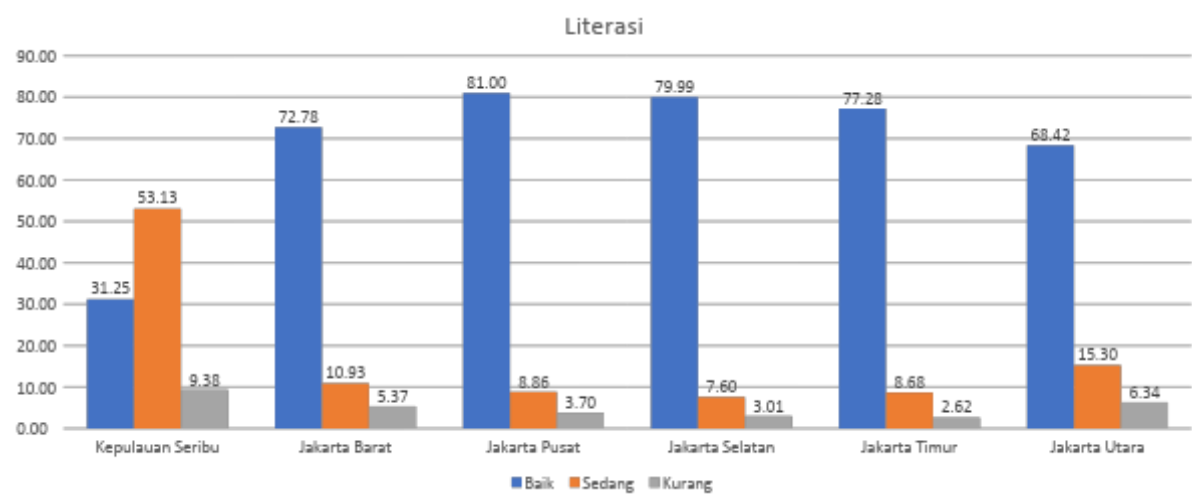
Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2024 dan RPJMD 2025-2029 permasalahan terkait pendidikan di DKI Jakarta adalah bahwa rata-rata lama bersekolah belum tuntas sampai dengan pendidikan menengah yakni baru mencapai angka 11,49 tahun dari yang seharusnya 12 tahun (Setara SMA/SMK). Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi wilayah yang memiliki rata-rata lama bersekolah terendah dari seluruh wilayah kota/kabupaten administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga perlu perhatian dan kebijakan khusus untuk meningkatkan nilai rata-rata lama sekolah di wilayah tersebut. Angka partisipasi sekolah terendah dan putus sekolah tertinggi berada pada jenjang SMA/SMK/MA, yang menunjukkan ketidaktuntasan pendidikan dasar dan menengah atau wajib belajar 12 tahun dan ke depannya dapat berpengaruh pada

indikator modal manusia kota global yang mempersyaratkan lulusan perguruan tinggi harus mencapai 50 persen dari jumlah populasi kota. Selain itu, pada jenjang PAUD dan SLB juga masih terdapat ketimpangan akses pendidikan karena terbatasnya daya tampung satuan pendidikan negeri.

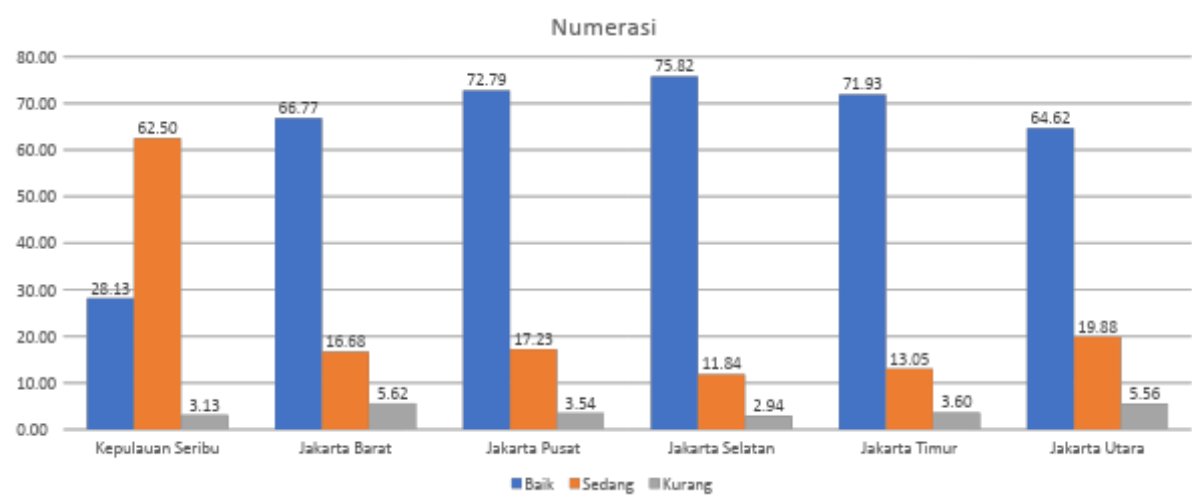
Permasalahan lainnya adalah terkait mutu pendidikan yang dinilai dari hasil literasi dan numerasi. Kesenjangan mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil capaian literasi dan numerasi pada satuan pendidikan negeri dan swasta yang cukup timpang, dimana pada satuan pendidikan swasta lebih rendah capaiannya daripada satuan pendidikan negeri. Selain itu kesenjangan wilayah terkait mutu pendidikan juga dapat dilihat dari perbedaan rata-rata skor literasi, numerasi, di satuan pendidikan yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 9 Persentase Capaian Literasi di Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Rapor Pendidikan

Gambar 10 Persentase Capaian Numerasi di Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

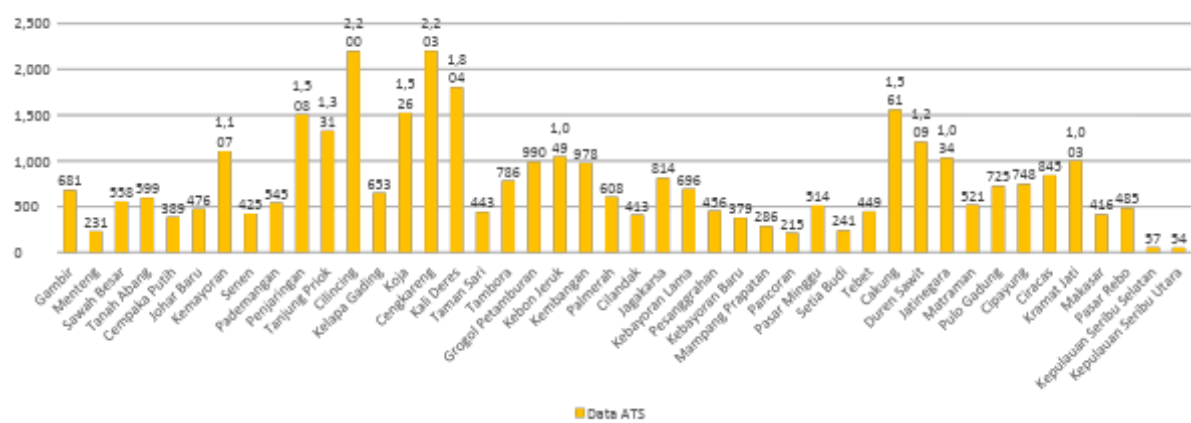


Sumber: Rapor Pendidikan

Dapat dilihat dari tabel di atas wilayah Kepulauan Seribu juga masih menjadi wilayah yang memiliki kualitas pendidikan cukup timpang dibanding wilayah lainnya, hal ini menandakan layanan terkait sarana prasarana, kualitas guru belum mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak. Selain itu permasalahan lainnya

adalah terkait anak tidak sekolah yang masih cukup tinggi di Provinsi DKI Jakarta, data anak tidak sekolah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 11 Jumlah Anak Tidak Sekolah Per Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



Sumber dan Cut off: Dashboard Verval DO/LTM Kemdikdasmen, Mei 2025

Pada grafik di atas dapat dilihat kecamatan yang sangat tinggi anak tidak sekolah berada pada Penjaringan, Cilincing, Tanjung Priok, Cengkareng, Kalideres, dan Cakung. Pada kecamatan tersebut juga merupakan wilayah yang memiliki kantong kemiskinan yang cukup banyak dan pemukiman kumuh, maka hal ini berkorelasi dengan faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat mempengaruhi anak tidak sekolah.

b. Rumusan Isu Strategis

Dinas Pendidikan telah merumuskan 7 poin besar yang menjadi isu strategis pembangunan pendidikan di DKI Jakarta. Seperti diketahui sebelumnya DKI Jakarta pada tahun 2024 statusnya tidak lagi sebagai ibukota negara, transformasi yang dilakukan adalah DKI Jakarta akan menjadi kota pusat bisnis berskala global. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pendidikan memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mewujudkan ide tersebut. Adapun ketujuh isu strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Rumusan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendidikan	Rata-rata lama sekolah yang belum mencapai 12 tahun (tuntas pendidikan menengah) dan masih rendahnya angka partisipasi sekolah jenjang menengah yang belum mencapai 95%	Ketimpangan Akses Pendidikan	-	-	-	Keterbatasan daya tampung jenjang sekolah negeri pada jenjang SMA dan SMK



Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Masih rendahnya angka partisipasi sekolah anak disabilitas yang belum mencapai 95%	Ketimpangan Akses Pendidikan	-	-	-	Keterbatasan daya tampung SLB dan belum semua kecamatan memiliki SLB Negeri
	Masih rendahnya angka partisipasi sekolah PAUD yang belum mencapai 95%	Ketimpangan Akses Pendidikan				Keterbatasan daya tampung PAUD Negeri
	Masih rendahnya mutu pendidikan di kepulauan Seribu	-	-	-	-	Kualitas guru dan sarana prasarana yang belum merata pada kepulauan seribu serta kontrol atas monitoring dan evaluasi yang belum berjalan optimal
	Masih banyaknya anak tidak sekolah di DKI Jakarta	Ketimpangan Akses Pendidikan	-	-	-	Faktor anak tidak sekolah tidak hanya di dominasi oleh faktor ekonomi, namun terdapat faktor sosial dan budaya sehingga perlu kerja sama lintas sektor dalam penanganannya
	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan tinggi belum di atas 50%	-	-	-	-	Terbatasnya akses pendidikan tinggi khususnya bagi kelompok miskin
	Belum meratanya mutu pendidikan di semua satuan pendidikan					Tidak semua satuan pendidikan memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai standar nasional pendidikan, dan belum semua guru sesuai dengan kompetensi dan keahlian

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Tahun 2025-2029

Tujuan rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Keberlanjutan Pendidikan dan Kompetensi Serta Daya Saing Lulusan. Sementara sasarannya adalah Menjamin Akses, Layanan, dan Tata Kelola Berkualitas Untuk Meningkatkan Partisipasi Pendidikan. Indikator dari tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas dan Kesempatan Pendidikan untuk Semua	Meningkatnya Keberlanjutan Pendidikan dan Kompetensi Serta Daya Saing Lulusan		Harapan Lama Sekolah		13,64	13,67	13,87	13,89	13,95	
			Persentase Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi		77,82	78,71	79,43	80,05	80,59	
		Menjamin Akses, Layanan, dan Tata Kelola Berkualitas Untuk Meningkatkan Partisipasi Pendidikan	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun		11,7	11,85	12,23	12,27	12,3	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi		19,2	19,5	20,1	21,52	21,6	
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca		83,33	83,33	83,33	100	100	
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi		66,67	66,77	83,33	83,33	83,33	
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk		86,2	86,5	87,06	89,56	89,58	

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Literasi membaca							
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi		78,4	78,6	78,83	81,23	81,25	

### III.2 Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, sinergi kerja sama antara satuan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, Dinas Pendidikan mendukung program pemerintah pusat seperti SMA Unggul Garuda sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan serta pengelolaan SMA Unggul Garuda. Sebagai implementasi di daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran SMA Unggul Garuda melalui SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin yang memenuhi persyaratan sebagai sekolah Garuda Transformasi karena merupakan sekolah berasrama yang penganggarannya sudah sepenuhnya dibiayai melalui sumber dana APBD dan BOSP APBN. Sekolah ini diposisikan sebagai pusat unggulan pendidikan yang mengintegrasikan inovasi pembelajaran, pengembangan kepemimpinan, dan layanan akademik berkualitas tinggi. Transformasi tersebut berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu pemerataan kesempatan berprestasi, pembentukan karakter kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045, serta sinergi pendidikan akademik dengan pengabdian masyarakat. Program ini diperkuat melalui penerapan digitalisasi pembelajaran, pengembangan profesionalisme guru, serta penyediaan sarana dan prasarana modern yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga mendorong tata kelola berbasis data, optimalisasi anggaran BOSP, BOP, dan BLUD, serta penguatan sistem evaluasi untuk menjamin akuntabilitas. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dengan perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat menjadi instrumen penting untuk memperluas dampak program. Melalui langkah ini, SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin diharapkan menjadi penggerak utama peningkatan mutu pendidikan menengah di Jakarta. Dengan demikian, Sekolah Unggul Garuda Transformasi di Jakarta menjadi pionir perubahan yang melahirkan generasi berkarakter Pancasila, berdaya saing global, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dalam mendukung visi Jakarta menjadi top 50 kota global, Dinas Pendidikan menyediakan program KJMU. Saat ini KJMU masih merupakan bantuan sosial yang difokuskan untuk anak-anak dari keluarga miskin, namun pengaturan KJMU akan direncanakan disesuaikan agar KJMU dapat menysasar seluruh anak Jakarta dan tetap melakukan afirmasi bagi anak dari keluarga miskin. Pengaturan ini juga akan melaksanakan program beasiswa hingga jenjang Magister dan Doktoral, sehingga indeks kota global DKI Jakarta dapat meningkat.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga mendukung sekolah rakyat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Program ini diharapkan

dapat menjadi solusi pemerataan pendidikan bagi anak kurang mampu yang mempunyai potensi akademik yang tinggi. Dukungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berupa menyediakan data terkait siswa *eligible* untuk masuk ke sekolah rakyat dengan kriteria kurang mampu tetapi mempunyai potensi akademik yang tinggi. Dinas Pendidikan yakin dengan berkolaborasi akan mewujudkan pemerataan pendidikan dan pendidikan yang berkeadilan serta berkelanjutan.

Dalam mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu, akan dilakukan pembangunan Rumah Dinas di pulau terjauh dan terluar. Rumah dinas guru di Kepulauan Seribu adalah hunian atau tempat tinggal yang disediakan oleh pemerintah untuk guru yang berasal dari luar pulau dan bertugas di Kepulauan Seribu. Tujuan penyediaan rumah dinas ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan, mempermudah guru dalam menjalankan tugasnya, mengurangi risiko perjalanan, dan memaksimalkan proses belajar mengajar.

Fungsi Rumah Dinas Guru:

1. Memudahkan tugas mengajar : Guru yang tinggal dekat sekolah dapat lebih fokus pada pengajaran dan mengurangi waktu tempuh.
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran : Dengan guru yang tinggal di lokasi yang sama, respons terhadap situasi di sekolah menjadi lebih cepat.
3. Memberi dukungan di wilayah kepulauan : Di lokasi yang sulit dijangkau, rumah dinas dapat mengatasi kesulitan guru untuk tinggal dan mengajar.

Rumah dinas biasanya dibangun dekat sekolah, seperti di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Sabira, Pulau Tidung, dan Pulau Untung Jawa. Bentuknya sederhana berupa rumah panggung atau rumah tembok, dilengkapi kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan fasilitas dasar. Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menyediakan serta memelihara rumah dinas ini. Jenjang pendidikan yang tersedia umumnya mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK, meskipun jumlahnya terbatas karena sebaran penduduk dan luas wilayah. Selain itu penyediaan sarana mobilitas kapal untuk pendidik dan peserta didik disediakan untuk mendukung akses menuju satuan pendidikan. Mobilitas pelajar pada wilayah DKI Jakarta mendapat dukungan dari Dinas Perhubungan dengan penyediaan Bus Sekolah.

Pada aspek peningkatan layanan disabilitas dengan semangat mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) berkomitmen penuh dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif. Mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2024, ULD berperan vital dalam meningkatkan kompetensi guru melalui bimbingan teknis, menyediakan pendampingan, serta mengelola data kebutuhan akomodasi bagi peserta didik penyandang disabilitas. Hal tersebut merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru dalam memberikan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Melalui program vokasi dan pelatihan keterampilan kerja, ULD juga bertugas mempersiapkan peserta didik disabilitas untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, ULD akan menjalin kerja sama dengan lembaga dan pihak lain, termasuk perusahaan, untuk program magang dan penempatan kerja, sekaligus memastikan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan terpenuhi. Peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik disabilitas ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang berkeadilan dan setara bagi seluruh warga Jakarta.

Untuk peningkatan layanan bagi peserta didik disabilitas, juga akan disediakan Guru Pembimbing Khusus (GPK). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 adalah Peraturan yang mengatur tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Pada pasal 10 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Peran pemerintah daerah adalah menjamin hak pendidikan yang setara bagi semua anak, menyediakan regulasi teknis, menunjuk sekolah inklusif, memfasilitasi GPK, sarana-prasarana, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Pada Provinsi DKI Jakarta kebutuhan GPK masih sangat tinggi, dan saat ini banyak ditutupi oleh guru reguler yang sudah mendapat pelatihan pendidikan inklusi. Pemerintah daerah melakukan beberapa upaya, yaitu advokasi, pelatihan, serta penyediaan layanan untuk memperkuat keberadaan dan peran GPK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Berdasarkan data dari 561 lembaga inklusi di DKI Jakarta, hanya ada 11 GPK aktif (semuanya berada di wilayah Jakarta Selatan) sehingga masih terdapat kekurangan 550 GPK untuk memenuhi kebutuhan minimal.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperkuat implementasi PAUD Holistik Integratif sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. PAUD Holistik Integratif mengupayakan pengembangan seluruh aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan fisik (pertumbuhan dan perkembangan motorik kasar, halus, serta kesehatan anak), kognitif (perkembangan daya pikir, daya cipta, dan kemandirian), social emosional (perkembangan emosi, sosial, dan kemampuan berbahasa anak, serta moral (perkembangan nilai-nilai dan sikap anak).

Terkait digitalisasi pembelajaran, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing di tingkat dunia menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini, hal tersebut yang membuat Indonesia secara berkesinambungan terus berbenah khususnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berangkat dari Inpres Nomor 7 Tahun 2025 yang memuat langkah untuk mempercepat pelaksanaan digitalisasi pembelajaran, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan berbasis teknologi, sekaligus memperkuat ekosistem pembelajaran berbasis digital yang menyeluruh dan inklusif. Digitalisasi pembelajaran bertujuan untuk menghadirkan proses belajar yang lebih fleksibel, interaktif, dan mampu menjawab tantangan zaman, khususnya dalam masa adaptasi teknologi dan otomatisasi. Sebagai langkah nyata dari program digitalisasi pembelajaran, melalui Kemendikdasmen melakukan implementasi smart classroom dan bantuan *Interactive Flat Panel* (IFP) di satuan pendidikan. Saat ini sekitar 65,53% satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas di provinsi DKI Jakarta sudah menerima bantuan IFP dan proses ini masih terus berjalan. Harapan ke depan adalah agar program digitalisasi pembelajaran ini dapat segera menjangkau seluruh sekolah di Jakarta, termasuk sekolah dasar hingga menengah atas, serta mampu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara signifikan. Diharapkan pula, digitalisasi ini dapat mendorong kreativitas siswa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan yang semakin digital dan kompetitif.

Terkait Tes Kemampuan Akademik (TKA), selama ini berbagai instrumen penilaian seperti Ujian Nasional dan Asesmen Nasional telah digunakan, namun muncul kebutuhan untuk memiliki alat ukur capaian akademik siswa yang lebih standar, objektif, dan dapat menyetarakan pendidikan formal, nonformal, dan informal. Terdapat

kesenjangan dalam akses dan mutu pendidikan antara daerah, antara jalur formal dan nonformal/informal, serta ketidakpastian dalam penggunaan hasil penilaian sebagai indikator kompetensi siswa. Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025, yang mengatur penyelenggaraan TKA, pelibatan satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta mekanisme sertifikasi hasil TKA. Tes Kemampuan Akademik mulai diberlakukan tahun 2025 sebagai upaya pemerintah dalam menjawab kebutuhan sistem penilaian pendidikan yang lebih adil dan merata. TKA bertujuan mengukur capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu secara standar nasional, agar tercipta data capaian yang objektif di seluruh Indonesia. Dengan pelaksanaan TKA, diharapkan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa di Indonesia, memperkuat data capaian akademik untuk perbaikan kebijakan, serta memastikan mutu pendidikan nasional lebih merata. Dalam mendukung kesehatan peserta didik, Dinas Pendidikan memiliki program kantin sehat dengan kolaborasi SKPD lain. Kantin sehat menjadi terobosan dalam menjaga gizi dan pola hidup sehat dari peserta didik.

Pengelolaan dan penataan pendidik akan dilakukan dengan mempertahankan kebutuhan jabatan yang berdasarkan jumlah beban mengajar dengan mata pelajaran yang dibutuhkan. Pengelolaan pendidik dilakukan dengan profesional dan akuntabel dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah. Profesionalitas pendidik akan ditingkatkan baik pada satuan pendidikan negeri maupun satuan pendidikan swasta. Peningkatan profesionalitas pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta dilakukan melalui peningkatan kompetensi pada seluruh aspek, program sertifikasi pendidik juga menjadi prioritas. Program guru SMK yang melakukan magang akan terus dilakukan guna mendukung percepatan revitalisasi kurikulum SMK agar selaras dengan DUDI. Selain itu pada pendidik di satuan pendidikan swasta yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui program sekolah swasta gratis, akan diupayakan agar gaji pendidik minimal UMP.

Berikut adalah beberapa strategi utama pembangunan sektor pendidikan di DKI Jakarta:

1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada jenjang PAUD, SMP/ sederajat, SMA/ Sederajat, SMK, dan SLB dilakukan melalui:
  - a. Peningkatan ketepatan sasaran Program Kartu Jakarta Pintar Plus;
  - b. Penambahan daya tampung Sekolah Negeri melalui Rehab Total dan Penambahan Ruang Kelas Baru;
  - c. Pembangunan Unit Sekolah Baru jenjang SMP, SMA, SMK, dan SLB;
  - d. Alih fungsi SD Negeri menjadi SMP Negeri, SLB Negeri, dan PAUD Negeri;
  - e. Pemerataan layanan pendidikan antar wilayah dengan menetapkan Zona Layanan Satuan Pendidikan (ZLSP);
  - f. Pembentukan satuan pendidikan satu atap/sekolah terintegrasi;
  - g. Kerja sama dengan satuan pendidikan swasta dalam Program Sekolah Swasta Gratis;
  - h. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan yang berasal dari APBD untuk satuan pendidikan Negeri;
  - i. Penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang berasal dari APBN;
  - j. Penyediaan transportasi laut bagi peserta didik di kepulauan seribu;
  - k. Penyelenggaraan satuan pendidikan berasrama;
  - l. Penyelenggaraan satuan pendidikan terbuka;

- m. Pemberian Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS);
  - n. Pemerataan dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dilakukan melalui:
    - a. Rehabilitasi gedung sekolah;
    - b. Digitalisasi satuan pendidikan;
    - c. Penyediaan mebel dan perlengkapan sekolah;
    - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana kantin sekolah;
    - e. Penyediaan alat peraga/praktik satuan pendidikan.
  3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui:
    - a. Bimbingan teknis kepada pendidik dan tenaga kependidikan;
    - b. Pelatihan pembuatan konten digital kepada pendidik;
    - c. Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan;
    - d. Pelatihan inklusi kepada pendidik dan kepala sekolah;
    - e. Pelatihan penanganan kekerasan di satuan pendidikan kepada Satgas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
  4. Peningkatan kemampuan hasil belajar peserta didik dan iklim pada satuan pendidikan dilakukan melalui:
    - a. Penyelenggaraan lomba berjenjang peserta didik;
    - b. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan
    - c. Transformasi model pembelajaran digital;
    - d. Optimalisasi peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan;
    - e. Asesmen diagnostik siswa;
    - f. Penguatan pembangunan pembiasaan dan kesastraan;
    - g. Pembiasaan bahasa asing pada satuan pendidikan;
    - h. Menetapkan standar pendidikan untuk penguatan pendidikan karakter berbasis kebangsaan dan kearifan lokal;
    - i. Urban farming pada satuan pendidikan;
    - j. Peningkatan layanan konseling kesejahteraan siswa, pendidik, tendik.
  5. Peningkatan keterserapan lulusan SMK ke dunia kerja dan dunia usaha dilakukan melalui:
    - a. Sinkronisasi kurikulum, melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan dunia usaha dan dunia industri dalam peningkatan pembelajaran meliputi program magang, Bursa Kerja, guru tamu, dan uji kompetensi di SMK;
    - b. Pelatihan vokasi bekerja sama dengan industri dan dunia usaha;
    - c. Penyediaan alat praktik peserta didik SMK;
    - d. Sertifikasi kompetensi bagi peserta didik dari lembaga nasional dan internasional;
    - e. Sertifikasi kompetensi bagi pendidik dari lembaga nasional dan internasional;
    - f. Perluasan pembangunan *teaching factory*;
    - g. Penyediaan guru tamu produktif yang memiliki kompetensi keahlian;
    - h. Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan BLUD pada SMK;
    - i. Penyelenggaraan program fast track ke perguruan tinggi bagi lulusan SMK.
  7. Pemenuhan Wajib Belajar 13 Tahun dengan Wajib 1 Tahun PAUD dilakukan melalui:
    - a. Pemenuhan layanan TK, dan TK-SD satu atap.
    - b. Menyederhanakan perizinan PAUD berupa Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan PAUD dalam satu atap

- c. Melakukan sosialisasi PAUD 1 Tahun dengan melibatkan lintas sektor pada level kelurahan
- 8. Kolaborasi lintas sektor dalam penanganan anak tidak sekolah dilakukan melalui:
  - a. Pembentukan tim penanganan anak tidak sekolah yang melibatkan lintas sektor
  - b. Penyusunan juknis penanganan anak tidak sekolah
  - c. Pelaksanaan forum penanganan anak tidak sekolah melibatkan diskusi, rapat koordinasi, dan kegiatan sosialisasi di berbagai tingkatan (kelurahan, kota/kabupaten, provinsi) untuk mengidentifikasi, memvalidasi data anak tidak sekolah, serta merancang strategi intervensi dan koordinasi lintas sektor.

Dalam melaksanakan strategi pembangunan pendidikan seperti yang telah diuraikan di atas, penahapan pembangunan perlu dilakukan untuk menyusun prioritas pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra, tahapan pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9 Tahapan Strategi Pembangunan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemerataan akses dan mutu pendidikan khususnya pada Kepulauan Seribu	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan jenjang SMP	Pemerataan dan Perluasan akses pendidikan jenjang PAUD, SLB, SMA, dan SMK	Peningkatan mutu pendidikan yang diukur melalui kemampuan Literasi dan Numerasi di seluruh jenjang	Peningkatan keterserapan lulusan SMK pada DUDI dan meningkatnya lulusan Pendidikan Menengah yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi

### III.3 Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dan Renstra Kemendikdasmen. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan prioritas nasional butir 4 (empat) yaitu, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Dalam Renstra Kemendikdasmen, untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan yang telah dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

- a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
- b. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran



- c. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
- d. Penguatan sistem tata kelola pendidikan
- e. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan produktivitas tenaga kerja

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan berkeadilan, arah kebijakan Dinas Pendidikan disinkronisasi ke dalam program-program yang selaras dengan Prioritas Nasional 4 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10 Sinkronisasi Arah Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan)

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Arah Kebijakan Dinas Pendidikan
1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Peningkatan partisipasi, hasil belajar, dan keberlanjutan pendidikan berkualitas yang inklusif
2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Peningkatan partisipasi, hasil belajar, dan keberlanjutan pendidikan berkualitas yang inklusif
3	Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	Peningkatan partisipasi, hasil belajar, dan keberlanjutan pendidikan berkualitas yang inklusif
4	Penguatan sistem tata kelola pendidikan	Peningkatan partisipasi, hasil belajar, dan keberlanjutan pendidikan berkualitas yang inklusif
5	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan partisipasi, hasil belajar, dan keberlanjutan pendidikan berkualitas yang inklusif

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di DKI Jakarta dari tahun 2025-2029 perlu kebijakan yang dapat merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan pendidikan di DKI Jakarta yang sesuai dengan RPJMN 2024-2029, Renstra Kemendikbud 2020-2024, dan RPJMD 2025-2029 untuk tercapainya pemerataan kesempatan pendidikan untuk semua dan edukasi terkait pembelajaran sepanjang hayat yang memiliki daya saing global.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 11 Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Urusan Pendidikan	Layanan pendidikan dasar dan menengah, Layanan kesehatan primer, Pemenuhan gizi	Peningkatan partisipasi, hasil belajar, dan keberlanjutan pendidikan berkualitas yang inklusif	-

III.4 Penyusunan Pohon Kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Penyusunan pohon kinerja merupakan amanat dari Permenpan RB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan pohon kinerja (Cascading) akan menjadi pedoman dalam penyusunan perjenjangan kinerja para pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan setiap tahun. Pada penyusunan pohon kinerja Dinas Pendidikan, outcome yang ingin dicapai dan menjadi tujuan Renstra yang menjadi Level 1 dalam pohon kinerja, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 Rumusan Tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 berdasarkan Isu Strategis

MANDAT:	ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	TUJUAN RENSTRA
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus belum mencapai diatas 95%	Meningkatnya Keberlanjutan Pendidikan dan Kompetensi serta Daya Saing Lulusan: 1. Harapan Lama Sekolah 2. Persentase Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi
	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan tinggi belum di atas 50%	
HARAPAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus mencapai di atas 95%	
	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan tinggi di atas 50%	

Setelah disusunnya level 1 tujuan Renstra, maka dapat ditentukan apa yang menjadi sasaran Renstra dan menjadi level 2 dalam pohon kinerja yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13 Rumusan Sasaran Renstra Berdasarkan *Critical Success Factor* Tujuan Renstra

TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	STRATEGI	SASARAN RENSTRA
Harapan Lama Sekolah	Harapan lama sekolah mencapai 13,89-13,95 tahun	1. Penambahan daya tampung Satuan Pendidikan Negeri 2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Penyediaan Bantuan Sosial Pendidikan	Rata-rata lama sekolah

TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	STRATEGI	SASARAN RENSTRA
		<p>bagi peserta didik miskin</p> <p>4. Bekerja sama dengan satuan pendidikan swasta dalam perluasan akses pendidikan</p> <p>5. Pemenuhan Wajib Belajar 13 Tahun dengan Wajib 1 Tahun PAUD</p> <p>6. Kolaborasi penanganan dan pencegahan anak tidak sekolah</p>	
Persentase Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persentase Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi mencapai 80,59%	<p>1. Penyediaan bantuan sosial dan beasiswa melanjutkan ke Perguruan Tinggi KJMU</p> <p>2. Pelatihan vokasi bekerja sama dengan industri dan dunia usaha</p> <p>3. Peningkatan kualitas pendidik melalui pelatihan terstruktur</p>	<p>1. Persentase Kabupaten/ Kota yang mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca</p> <p>2. Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi</p> <p>3. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca</p>

TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	STRATEGI	SASARAN RENSTRA
			4. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi 5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Setelah tersusunnya pohon kinerja level 2 maka dapat dirumuskan pohon kinerja level 3 yang akan menjadi program Renstra beserta Indikatornya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Identifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya Berdasarkan Critical Success Factor Sasaran Renstra

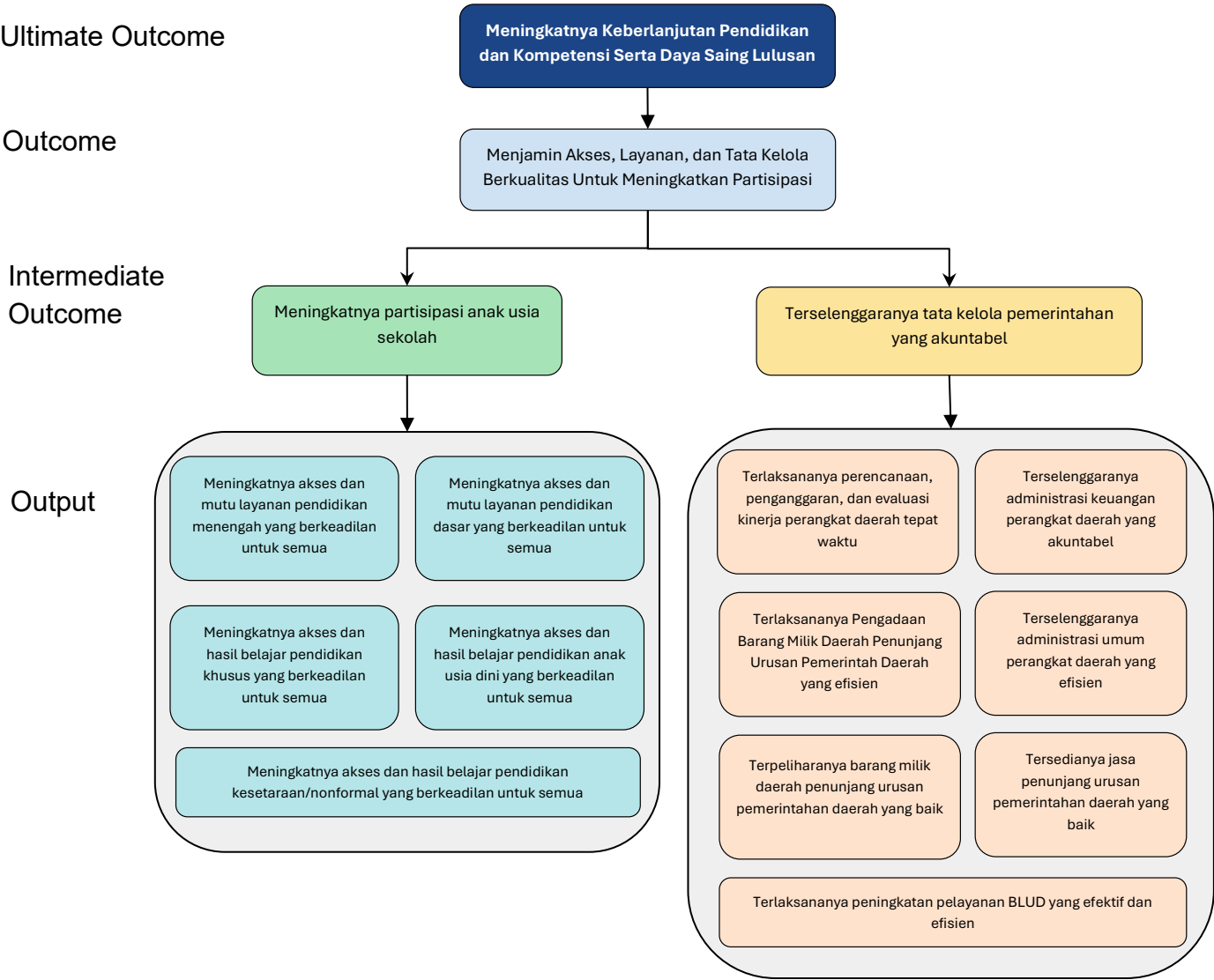
(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra	Kondisi Akhir yang diharapkan Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung Perangkat Daerah Lain
Rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah mencapai 12,3 tahun	1. Penambahan daya tampung Satuan Pendidikan Negeri 2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Penyediaan Bantuan Sosial Pendidikan bagi peserta didik miskin 4. Bekerja sama dengan satuan pendidikan swasta dalam perluasan akses pendidikan 5. Kolaborasi penanganan dan	Program Pengelolaan Pendidikan, dengan Indikator: 1. Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS) 2. Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 3. Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	

(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra	Kondisi Akhir yang diharapkan Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung Perangkat Daerah Lain
		pencegahan anak tidak sekolah	<p>4. Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)</p> <p>5. Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)</p>	
<p>1. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Persentase Kabupaten/ Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca</p> <p>3. Persentase Kabupaten/ Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional</p>	<p>1. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi mencapai 21,6%</p> <p>2. Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca dan Numerasi mencapai 100%</p> <p>3. Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada</p>	<p>1. Penyediaan bantuan sosial dan beasiswa melanjutkan ke Perguruan Tinggi KJMU</p> <p>2. Pelatihan vokasi bekerja sama dengan industri dan dunia usaha</p> <p>3. Peningkatan kualitas pendidik melalui pelatihan terstruktur</p>	<p>Program Pengelolaan Pendidikan dengan Indikator:</p> <p>1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi</p> <p>2. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK</p> <p>3. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum</p> <p>4. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum</p>	

(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra	Kondisi Akhir yang diharapkan Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung Perangkat Daerah Lain
Untuk Numerasi 4. Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca 5. Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca 89,58% dan Numerasi mencapai 81,25%			

Berdasarkan hasil rumusan pohon kinerja dari Tujuan Renstra ke Sasaran Renstra, kemudian sampai pada level program yang selanjutnya akan di breakdown sampai ke level kegiatan (output) dapat dilihat pada gambar 10 mengenai turunan dari level ultimate outcome sampai output. Penjabaran pohon kinerja ini akan digunakan dalam perencanaan tahunan untuk menentukan Key Performance Indicator dari setiap level pemangku kebijakan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sehingga penilaian kinerja dari seluruh pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan bisa terpetakan dan tersistematis sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Gambar 12 Pohon Kinerja Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENDIDIKAN**

#### **IV.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan**

Pada bagian ini menjelaskan tentang uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan. Dasar penentuan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah di sesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dan penganggaran Dinas Pendidikan.

Berdasarkan Kepmendagri tersebut Dinas Pendidikan mengampu Bidang Urusan Pendidikan sehingga menggunakan Program Pengelolaan Pendidikan. Provinsi DKI Jakarta yang memiliki otonomi khusus mengatur pengelolaan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan Kesetaraan/Nonformal menggunakan Nomenklatur Kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
5. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
6. Pengelolaan Pendidikan Khusus
7. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dimana terdapat kewenangan tambahan dalam pengelolaan akademi komunitas, namun karena belum terdapat penjelasan mengenai tata kelola pelaksanaan akademi komunitas maka Nomenklatur Pengelolaan Akademi Komunitas belum digunakan pada Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029. Selain itu untuk menunjang kegiatan perkantoran Dinas Pendidikan menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Peningkatan Pelayanan BLUD

Mengenai Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta dengan target kinerja dan anggaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



## BAB IV

## PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1,1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KESEMPATAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA																	
1	MENINGKATNYA KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI SERTA DAYA SAING LULUSAN	HARAPAN LAMA SEKOLAH	Tahun	13,63	13,64	17.448.908.362.617	13,67	18.014.363.810.501	13,87	18.579.819.258.386	13,89	19.145.274.706.271	13,95	19.710.730.154.156	13,95	92.899.096.291.931		
		PERSENTASE LULUSAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI YANG BEKERJA DI BIDANG KEAHLIAN MENENGAH TINGGI	Persentase	76,7	77,82		78,71		79,43		80,05		80,59		80,59			
1,1	MENJAMIN AKSES, LAYANAN, DAN TATA KELOLA BERKUALITAS UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK USIA DI ATAS 15 TAHUN	Tahun	11,53	11,7	17.448.908.362.617	11,85	18.014.363.810.501	12,23	18.579.819.258.386	12,27	19.145.274.706.271	12,3	19.710.730.154.156	12,3	92.899.096.291.931		
		PROPORSI PENDUDUK BERUSIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BERKUALIFIKASI PENDIDIKAN TINGGI	Persentase	19,08	19,2		19,5		20,1		21,52		21,6		21,6			
		PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM PADA ASESMEN TINGKAT NASIONAL UNTUK LITERASI MEMBACA	Persentase	83,33	83,33		83,33		83,33		100		100		100			
		PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM PADA ASESMEN TINGKAT NASIONAL UNTUK NUMERASI	Persentase	66,67	66,67		66,67		83,33		83,33		83,33		83,33			
		PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM PADA ASESMEN TINGKAT NASIONAL UNTUK LITERASI MEMBACA	Persentase	86,17	86,2		86,5		87,06		89,56		89,58		89,58			
		PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM PADA ASESMEN TINGKAT NASIONAL UNTUK NUMERASI	Persentase	77,63	78,4		78,6		78,73		81,23		81,25		81,25			
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks	4	4	8.757.518.033.503	4	8.621.205.600.045	4	8.487.083.946.647	4	8.356.826.398.714	4	8.291.302.761.837	4	42.513.936.740.746	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
																	BIDANG PROGRAM DAN ANGGARAN	
																	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	1.395.676.141	100	1.465.459.948	100	1.538.732.946	100	1.615.669.593	100	1.696.453.072	100	7.711.991.700	BIDANG PROGRAM DAN ANGGARAN	DKI JAKARTA
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	1.138.373.209	6	1.195.291.869	6	1.255.056.463	6	1.317.809.286	6	1.383.699.750	6	6.290.230.577	BIDANG PROGRAM DAN ANGGARAN	DKI JAKARTA
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	257.302.932	1	270.168.079	1	283.676.483	1	297.860.307	1	312.753.322	1	1.421.761.123	BIDANG PROGRAM DAN ANGGARAN	DKI JAKARTA
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	4	4	8.664.741.067.016	4	8.518.643.798.192	4	8.375.190.861.172	4	8.234.337.466.063	4	8.096.031.303.738	4	41.888.944.496.181	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	SEKRETARIAT	
																	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	39188	37444	8.664.588.817.016	35837	8.518.480.550.144	34202	8.375.022.613.514	32604	8.234.164.718.873	31094	8.095.857.556.548	31094	41.888.114.256.095	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	80	152.250.000	80	163.248.048	80	168.247.658	80	172.747.190	80	173.747.190	80	830.240.086	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	4	4	26.146.195.783	4	26.911.090.220	4	28.159.854.373	4	29.209.983.322	4	30.258.087.309	4	140.685.211.007	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	16	1.392.115.484	16	1.392.115.484	16	1.392.115.484	16	1.392.115.484	16	1.392.115.484	16	6.960.577.420	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	50	11.741.182.660	50	11.694.817.714	50	12.081.872.302	50	12.466.990.272	50	12.768.470.075	250	60.753.333.023	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
																	SEKRETARIAT	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	40	3.317.035.314	39	3.410.954.601	41	3.825.550.880	41	3.945.639.012	41	4.211.707.992	202	18.710.887.799	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	28	4.844.225.144	32	5.127.160.803	32	5.410.648.079	32	5.705.056.108	32	6.007.791.374	156	27.094.881.508	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	18	152.384.495	19	188.428.152	19	202.404.706	19	216.375.964	19	231.884.358	94	991.477.675	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	9	9	421.697.569	10	493.854.132	9	462.158.868	10	509.401.067	9	514.878.224	9	2.401.989.860	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	28	199.564.156	32	201.161.556	32	217.264.680	32	238.332.502	32	250.381.062	156	1.106.703.956	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	76	2.386.740.001	80	2.711.346.818	80	2.876.588.414	80	3.044.821.953	80	3.189.607.780	396	14.209.104.966	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	4	1.691.250.960	4	1.691.250.960	4	1.691.250.960	4	1.691.250.960	4	1.691.250.960	4	8.456.254.800	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Indeks	0	4	6.460.566.482	4	8.333.467.122	4	11.888.512.001	4	16.300.102.541	4	16.682.903.161	4	59.665.551.307	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	390	2.237.314.160	420	2.822.416.693	432	4.742.543.359	506	5.821.124.513	511	6.047.137.095	2259	21.670.535.820	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	4	104.548.000	4	104.548.000	4	104.548.000	4	104.548.000	4	104.548.000	20	522.740.000	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	396	4.118.704.322	26	5.406.502.429	22	7.041.420.642	254	10.374.430.028	254	10.531.218.066	952	37.472.275.487	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	47.410.588.595	4	56.471.068.346	4	59.980.062.198	4	64.008.820.728	4	70.054.293.727	4	297.924.833.594	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	216	4.012.064.667	216	7.829.496.727	216	8.338.326.599	216	8.860.352.875	216	11.591.351.383	216	40.631.592.251	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	90	2.319.569.240	90	2.663.015.351	90	2.823.654.416	90	2.985.301.839	90	3.137.100.523	450	13.928.641.369	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	292	41.078.954.688	292	45.978.556.268	292	48.818.081.183	292	52.163.166.014	292	55.325.841.821	1460	243.364.599.974	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	7.063.939.486	4	7.880.716.217	4	8.825.923.957	4	9.854.356.467	4	70.779.720.830	4	104.404.656.957	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	52	529.295.495	53	595.585.364	53	674.003.702	55	775.855.330	55	819.193.909	55	3.393.933.800	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	480	497	1.302.480.645	625	1.514.007.676	630	1.784.466.929	652	2.061.074.955	658	2.327.362.674	658	8.989.392.879	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2	155.335.680	2	170.869.248	2	187.956.173	2	206.751.790	2	227.426.969	13	948.339.860	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	41	2	4.873.238.835	2	5.360.562.719	2	5.896.618.990	2	6.486.280.889	2	67.044.908.978	51	89.661.610.411	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	203.588.831	1	239.691.210	1	282.878.163	1	324.393.503	1	360.828.300	5	1.411.380.007	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	Indeks	4	4	4.300.000.000	4	1.500.000.000	4	1.500.000.000	4	1.500.000.000	4	5.800.000.000	4	14.600.000.000	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	DKI JAKARTA
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	12	12	4.300.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	5.800.000.000	12	14.600.000.000	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	DKI JAKARTA
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase	79,95	81,23	8.691.390.329.114	81,87	9.393.158.210.456	82,51	10.092.735.311.739	83,16	10.788.448.307.557	83,8	11.419.427.392.319	83,8	50.385.159.551.185	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS	
																	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	47,84	51,03		52,63		54,22		55,82		57,42		57,42		BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
																	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
		Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	Persentase	79,62	85,24		88,16		90,95		93,35		95,53		95,53		BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
																	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	98,98	99,35		99,49		99,63		99,69		99,74		99,74		BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
																	BIDANG SEKOLAH DASAR	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
																	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	Persentase	18,37	26,68		30,84		35,06		39,17		43,26		43,26	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
																BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS		
																PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN		
																SUKU DINAS PENDIDIKAN		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	Persentase	41,99	42,5		42,7		42,9		43,1		43,3		43,3	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS		
																BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN		
																PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase	89,98	91,68		92,53		93,38		94,22		95,07		95,07	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
																BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN		
																PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase	85,88	85,9		86		86,3		86,5		86,7		86,7	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS		
																BIDANG SEKOLAH DASAR		
																BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN		
																BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS		
																PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN		
																BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase	78,19	78,5		78,7		78,9		79,1		79,3		79,3	BIDANG SEKOLAH DASAR		
																BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS		
																BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS		
																BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN		
																PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN		
																SUKU DINAS PENDIDIKAN		
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	86,22	87,22	1.699.087.150.541	87,82	1.871.755.785.155	88,42	1.616.533.432.877	89,02	1.909.099.831.757	89,62	2.497.588.209.368	89,62	9.594.064.409.698	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS	DKI JAKARTA
																SUKU DINAS PENDIDIKAN		
																PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	73,49	76,69		78,29		79,89		81,49		83,09		83,09	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS		
																PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN		
		Indeks Iklim Keamanan SMA	Nilai	75,67	78,07		79,27		80,47		81,67		82,87		82,87	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS		
																PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN		
																SUKU DINAS PENDIDIKAN		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	Nilai	76	77,6		78,4		79,2		80		80,8		80,8	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN		
																BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMA	Nilai	66,75	69,75		71,25		72,75		74,25		75,75		75,75	SUKU DINAS PENDIDIKAN		
																BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS		
																PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN		
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA / MA / Sederajat	Persentase	100	100		100		100		100		100		100	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS		
																PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN		
																SUKU DINAS PENDIDIKAN		
1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	2	119.168.480.490	0	0	0	0	0	0	0	2	119.168.480.490	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA	
1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0		0	29.616.902.721	0		0	0	0	0	29.616.902.721	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA	
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	1	1.000.000.000	0		0	1.000.000.000	0	0	0	4	2.000.000.000	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA	
1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0		0	25.237.767.130	4	23.389.899.889	4	22.822.895.213	0	0	12	71.450.562.232	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	1814	1.000.000.000	5526	10.000.000	0	1.000.000.000	1934	10.000.000	1934	2.003.166.626	11208	4.023.166.626	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0	2	366.343.239	2	366.343.239	2	366.343.239	2	366.343.239	2	366.343.239	10	1.831.716.195	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA



Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	50451	34.737.917.825	50451	5.121.015.104	50451	34.737.917.825	50451	34.737.917.825	50451	34.737.917.825	50451	144.072.686.404	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.0040	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	0	18	2.793.798.614	18	2.933.488.545	18	3.080.162.972	18	3.234.171.121	18	3.395.879.677	90	15.437.500.929	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	1	1.001.300.216	1	500.650.108	1	500.650.108	1	500.650.108	1	500.650.108	5	3.003.900.648	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	11	2.733.988.936	11	2.733.988.936	11	2.733.988.936	11	2.733.988.936	11	2.733.988.936	11	13.669.944.680	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	0	93680	845.297.951.855	93680	845.297.951.855	93680	845.297.951.855	93680	845.297.951.855	93680	845.297.951.855	93680	4.226.489.759.275	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	14941	8.161.915.948	15155	8.536.345.281	15319	8.794.584.226	15487	9.074.211.673	11129	7.233.498.283	72031	41.800.555.411	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	0	1674	136.401.003.345	1787	137.899.787.882	1918	153.609.758.899	2009	167.224.368.535	1497	104.220.594.786	8885	699.355.513.447	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan an	0	80	19.250.000	100	23.800.000	120	26.400.000	150	30.300.000	150	30.300.000	600	130.050.000	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan an	0	525	74.634.602.394	527	301.396.291.700	529	47.982.181.455	531	316.316.900.200	533	322.285.143.600	533	1.062.615.119.349	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	30	353.550.000	37	527.630.000	37	527.630.000	37	527.630.000	37	527.630.000	178	2.464.070.000	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	180	92.475.000	180	119.035.000	210	144.315.000	210	144.315.000	210	144.315.000	990	644.455.000	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	0	1	9.180.000	1	9.363.600	1	9.738.144	1	9.730.800	1	9.914.400	5	47.926.944	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.0063	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	0	3	331.338.528	3	316.513.182	3	332.625.798	3	350.734.861	3	300.849.548	3	1.632.061.917	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	12	258.040.000	12	258.559.000	11	233.808.380	11	234.317.000	11	234.836.000	57	1.219.560.380	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	29.616.902.721	0	0	0	0	0	0	0	29.616.902.721	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	4072	2.675.970.000	3992	2.713.685.000	3992	2.713.685.000	3992	2.713.685.000	3992	2.713.685.000	20040	13.530.710.000	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan an	0	117	468.050.044.151	117	478.519.764.151	117	490.051.791.151	117	502.769.720.391	524	1.170.851.544.485	524	3.110.242.864.329	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	77,53	80,13	1.676.772.998.172	81,43	2.088.509.524.613	82,73	1.655.478.478.836	84,03	1.981.536.834.704	85,33	2.040.104.251.922	85,33	9.442.402.088.247	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64,08	68,48		70,68		72,88		75,08		77,28		77,28		BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	Nilai	72,62	75,02		76,22		77,42		78,62		79,82		79,82		BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	Nilai	71,89	74,49		75,79		77,09		78,39		79,69		79,69		BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	62,93	67,53		69,83		72,13		74,43		76,73		76,73		BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	80,32	81,4		81,94		82,48		83,02		83,56		83,56		PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	129.684.491.846	0	0	0	0	0	0	0	129.684.491.846	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	26.413.305.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.413.305.519	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000	2	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	58.048.241.897	6	61.049.241.897	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	3671	1.000.000.000	1952	10.000.000	4434	1.000.000.000	11484	10.000.000	5563	3.938.837.397	27104	5.958.837.397	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0	8	77.665.046	9	90.888.211	9	94.030.898	9	97.205.620	9	100.720.870	44	460.510.645	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	DKI JAKARTA
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	87899	48.884.938.915	87899	65.924.250.000	87899	65.924.250.000	87899	65.924.250.000	87899	65.924.250.000	87899	312.581.938.915	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	165	50.760.929.327	181	39.415.229.597	83	34.363.144.368	67	30.798.135.449	18	20.831.204.708	514	176.168.643.449	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	11	9.867.540.355	11	10.675.430.840	12	11.711.436.827	12	12.469.917.155	12	13.135.019.038	58	57.859.344.215	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	DKI JAKARTA
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	0	130938	924.047.966.800	130938	924.047.966.800	130938	924.047.966.800	130938	924.047.966.800	130938	924.047.966.800	130938	4.620.239.834.000	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	14821	13.366.747.761	16007	15.357.454.745	16203	18.595.556.722	16402	21.578.405.992	16477	24.837.850.431	79910	93.736.015.651	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	0	1316	104.091.654.962	1411	108.695.846.566	1489	119.263.799.614	1541	128.386.676.198	1580	135.462.519.322	7337	595.900.496.662	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	1050	840.000.000	1050	840.000.000	1050	840.000.000	1050	840.000.000	1050	840.000.000	5250	4.200.000.000	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan an	0	109	1.781.102.272	110	1.946.803.321	110	1.999.922.942	110	2.059.946.152	110	845.967.212	549	8.633.741.899	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN	DKI JAKARTA
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidik an	0	545	74.634.602.394	545	363.918.090.000	545	47.982.181.455	545	363.918.090.000	545	363.918.090.000	545	1.214.371.053.849	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0	557	59.600.000	557	59.600.000	557	59.600.000	557	59.600.000	2228	238.400.000	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	25	335.925.000	30	408.885.000	30	408.885.000	30	408.885.000	30	208.885.000	145	1.771.465.000	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	210	131.035.000	210	144.315.000	210	144.315.000	210	144.315.000	210	144.315.000	1050	708.295.000	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	0	0	0	1	37.260.000	1	37.260.000	1	37.260.000	1	37.260.000	4	149.040.000	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	0	883	1.336.440.000	800	1.126.750.000	792	1.113.181.000	796	1.115.845.000	796	1.115.845.000	4067	5.808.061.000	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	0	23	336.470.848	21	324.287.398	21	333.744.481	21	343.809.597	19	303.442.204	105	1.641.754.528	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	11	258.790.000	11	258.790.000	10	233.510.000	10	233.510.000	9	170.810.000	51	1.155.410.000	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS & PELATIHAN	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	0	48042	20.859.702.000	47434	21.668.561.000	47539	21.764.702.700	47950	21.979.224.285	48099	19.884.520.000	239064	106.156.709.985	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	3	17.986.247.023	3	12.313.890.128	2	6.848.624.559	0	0	8	37.148.761.710	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	1	17.039.311.085	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17.039.311.085	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidik an	0	101	374.737.958.519	101	380.959.378.021	101	387.203.537.962	101	394.188.383.457	101	401.663.939.443	101	1.938.753.197.402	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	5533	4.970.912.369	5485	4.927.999.245	5573	5.043.562.939	5577	5.046.784.440	5577	4.584.967.600	27745	24.574.226.593	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
																	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	39,04	42,24	194.486.304.900	43,84	218.448.148.108	45,44	156.768.964.400	47,04	176.111.784.524	48,64	219.365.195.054	48,64	965.180.396.986	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53,14	54,18		54,68		55,18		55,68			56,18		56,18	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	52,09	53,09		53,59		54,09		54,59			55,09		55,09	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	47,67	48,87		49,47		50,07		50,67			51,27		51,27	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53,32	53,82		54,07		54,32		54,57			54,82		54,82	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	53,95	54,95		55,45		55,95		56,45			56,95		56,95	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	Nilai	73,89	74,89		75,39		75,89		76,39			76,89		76,89	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	Nilai	68,11	70,51		71,71		72,91		74,11			75,31		75,31	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	Nilai	70,57	73,17		74,47		75,77		77,07			78,37		78,37	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	Nilai	73,33	75,33		76,33		77,33		78,33			79,33		79,33	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	Nilai	69,67	73,27		75,07		76,87		78,67			80,47		80,47	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	Nilai	72,43	76,43		78,43		80,43		82,43			84,43		84,43	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	Nilai	72,06	74,66		75,96		77,26		78,56			79,86		79,86	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	Nilai	63,72	66,52		67,92		69,32		70,72			72,12		72,12	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	Nilai	59,21	62,41		64,01		65,61		67,21			68,81		68,81	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	1	37.965.603.602	1	48.301.029.140	0	0	0	0	0	2	86.266.632.742	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA	
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	0	2	2.000.000.000	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA		
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	4402	66.880.000	1099	369.600.000	1627	10.000.000	1896	404.800.000	9024	851.280.000	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	1874	1.405.500.000	1874	1.405.500.000	1874	1.405.500.000	1874	1.405.500.000	1874	1.405.500.000	1874	7.027.500.000	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	1	270.621.680	1	270.621.680	0	2	541.243.360	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA		
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	4506	14.800.881.474	4576	14.833.524.724	4658	14.896.542.537	4725	14.948.864.690	4712	14.872.521.401	4712	74.352.334.826	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	3336	4.702.616.816	3365	5.352.922.678	3433	5.462.267.363	3496	5.580.641.967	3560	4.826.820.272	3560	25.925.269.096	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	0	266	18.786.204.572	289	22.243.345.450	309	24.659.790.403	307	25.551.284.751	285	23.988.582.186	285	115.229.207.362	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan an	0	100	7.900.000	100	7.900.000	100	7.900.000	100	7.900.000	100	7.900.000	100	39.500.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	DKI JAKARTA
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan an	0	83	30.464.180.000	83	30.740.120.000	83	16.074.202.981	83	31.081.760.000	83	31.147.460.000	415	139.507.722.981	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	DKI JAKARTA
1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	2	200.000.000	12	277.280.000	12	277.280.000	12	277.280.000	12	385.280.000	12	1.417.120.000	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	0	3	178.300.000	4	206.900.000	4	214.400.000	4	221.900.000	4	221.900.000	4	1.043.400.000	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	2	50.560.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	146.560.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	DKI JAKARTA
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan an	0	21	85.714.623.436	21	88.604.588.436	21	91.841.349.436	21	95.466.521.436	21	141.814.921.195	21	503.442.003.939	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	215	189.735.000	360	266.440.000	340	245.310.000	340	245.310.000	340	245.310.000	340	1.192.105.000	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang	0	0	0	1	6.097.517.680	0	0	0	0	0	1	6.097.517.680	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA	
1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	0	2	20.200.000	2	20.200.000	2	20.200.000	2	20.200.000	2	20.200.000	2	101.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	DKI JAKARTA
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71,45	76,45	2.514.911.500.092	78,95	2.517.310.045.747	81,45	3.889.511.540.826	83,95	3.843.097.699.080	86,45	3.332.861.346.122	86,45	16.097.692.131.867	BIDANG SEKOLAH DASAR	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59,33	65,13		68,03		70,93		73,83		76,73		76,73		BIDANG SEKOLAH DASAR	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
		Presentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		BIDANG SEKOLAH DASAR	
																	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Keamanan SD	Nilai	77,71	79,51		80,41		81,31		82,21		83,11		83,11		BIDANG SEKOLAH DASAR	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Kebinekaan SD	Nilai	76,25	78,25		79,25		80,25		81,25		82,25		82,25		BIDANG SEKOLAH DASAR	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Inklusivitas SD	Nilai	62,64	67,64		70,14		72,64		75,14		77,64		77,64		BIDANG SEKOLAH DASAR	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	1	46.451.735.058	0	0	0	0	0	0	0	1	46.451.735.058	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	21	1.000.000.000	39	1.000.000.000	49	1.343.656.354.809	49	541.708.357.657	0	158	1.887.364.712.466	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA	
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	11	29.616.902.721	0	0	0	0	0	11	29.616.902.721	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	11	17.039.311.085	0	0	0	0	0	0	0	11	17.039.311.085	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	0	21029	1.000.000.000	28025	10.000.000	44923	1.000.000.000	42264	10.000.000	44844	57.881.474.675	181085	59.901.474.675	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	7169	4.869.803.725	7429	5.015.717.564	7501	5.194.134.109	7572	5.399.950.490	7632	5.604.572.056	7632	26.084.177.944	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	8493	678.057.719.919	8916	688.336.835.413	9505	756.663.809.711	9898	813.897.038.452	10063	867.841.819.195	46875	3.804.797.222.690	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	2850	2.280.000.000	2850	2.280.000.000	2850	2.280.000.000	2850	2.280.000.000	2850	2.280.000.000	14250	11.400.000.000	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	0	625	70.475.000	458	61.245.000	450	57.280.000	450	57.280.000	450	57.280.000	450	303.560.000	BIDANG SEKOLAH DASAR	DKI JAKARTA
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	0	2058	74.634.602.394	2064	102.567.249.220	2070	47.982.181.455	1966	737.263.479.337	1972	739.296.936.613	1972	1.701.744.449.019	BIDANG SEKOLAH DASAR	DKI JAKARTA
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	34	872.775.000	48	1.103.175.000	53	1.103.175.000	53	1.103.175.000	53	395.450.000	241	4.577.750.000	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	900	525.895.000	960	574.505.000	960	574.505.000	960	574.505.000	960	574.505.000	4740	2.823.915.000	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	0	3	78.900.000	3	175.740.000	3	180.290.000	3	192.860.000	3	192.860.000	15	820.650.000	BIDANG SEKOLAH DASAR	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0041	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	0	2	491.921.200	2	507.011.300	2	523.464.472	2	546.340.658	2	460.951.879	2	2.529.689.509	BIDANG SEKOLAH DASAR	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	25	489.990.000	25	495.450.000	21	363.365.800	21	402.650.000	20	260.802.000	112	2.012.257.800	BIDANG SEKOLAH DASAR	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	240049	162.997.438.915	240049	150.419.847.279	240049	180.036.750.000	240049	180.036.750.000	240049	180.036.750.000	240049	853.527.536.194	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	10020	7.034.667.000	9990	7.214.170.000	9990	7.214.170.000	9990	7.214.170.000	9990	7.214.170.000	49980	35.891.347.000	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	0	1304	368.795.009.316	1304	370.823.179.316	1304	372.893.199.716	1304	375.006.531.524	1304	321.361.346.058	1304	1.808.879.265.930	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	3	9.386.589.288	5	22.066.432.108	5	29.682.182.316	0	0	13	61.135.203.712	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	351713	1.120.947.428.646	351713	1.120.947.428.646	351713	1.120.947.428.646	351713	1.120.947.428.646	351713	1.120.947.428.646	351713	5.604.737.143.230	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	1	27.273.827.834	1	26.775.000.000	1	26.775.000.000	1	26.775.000.000	1	28.455.000.000	5	136.053.827.834	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	82,03	84,23	2.348.598.816.771	85,33	2.475.200.167.018	86,43	2.548.161.094.138	87,53	2.599.756.881.566	88,63	3.022.277.711.211	88,63	12.993.994.670.704	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	70,12	73,12		74,62		76,12		77,62		79,12		79,12		PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMP / MTs / Sederajat	Persentase	100	100	100		100		100		100		100			PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		Indeks Iklim Keamanan SMP	Nilai	74,02	77,02		78,52		80,02		81,52		83,02		83,02		PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	73,65	75,65		76,65		77,65		78,65		79,65		79,65		PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	62,75	67,55		69,95		72,35		74,75		77,15		77,15		PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	5	261.810.898.447	0	0	0	0	0	0	0	5	261.810.898.447	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	3	1.000.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	144.426.925.789	15	147.427.925.789	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	3	12.724.634.716	5	26.333.526.307	5	23.703.197.195	0	0	13	62.761.358.218	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	12082	1.000.000.000	16708	10.000.000	6234	1.000.000.000	5136	10.000.000	5376	5.611.277.780	45536	7.631.277.780	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	206028	846.226.585.188	206028	846.226.585.188	206028	846.226.585.188	206028	846.226.585.188	206028	846.226.585.188	206028	4.231.132.925.940	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	11557	6.540.476.920	12734	7.209.840.189	12952	7.471.829.934	13172	7.756.994.136	13258	8.070.441.941	63673	37.049.583.120	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	3476	280.258.009.398	3701	286.060.515.335	3973	318.119.394.665	4160	345.511.687.946	4245	370.403.019.286	19555	1.600.352.626.630	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	0	60	18.540.000	60	18.540.000	60	18.540.000	60	18.540.000	60	18.540.000	300	92.700.000	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	0	938	82.637.121.231	940	439.039.345.269	942	449.159.724.553	944	459.513.390.621	946	470.105.721.009	946	1.900.455.302.683	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	62	614.375.000	69	791.335.000	71	841.895.000	71	841.895.000	71	841.895.000	344	3.931.395.000	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	390	217.100.000	390	259.820.000	450	310.380.000	450	310.380.000	450	310.380.000	2130	1.408.060.000	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	0	2	47.150.000	2	47.150.000	2	47.150.000	2	47.150.000	2	47.150.000	10	235.750.000	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02.0054	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	0	25	399.973.120	25	413.637.470	25	429.335.624	25	447.377.196	25	467.135.301	125	2.157.458.711	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	18	367.200.000	18	386.430.000	18	386.430.000	14	285.310.000	14	285.310.000	82	1.710.680.000	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	0	315	746.414.136.927	316	761.466.988.527	316	777.172.137.759	316	794.440.209.176	391	1.055.819.164.809	391	4.135.312.637.198	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	6345	4.322.000.000	6615	4.820.395.000	6735	4.921.515.000	6735	4.921.515.000	6735	4.921.515.000	33165	23.906.940.000	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	152296	114.222.000.000	152296	114.222.000.000	152296	114.222.000.000	152296	114.222.000.000	152296	114.222.000.000	152296	571.110.000.000	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	1	2.503.250.540	1	1.501.950.324	1	500.650.108	1	500.650.108	1	500.650.108	5	5.507.151.188	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD	Persentase	84,27	86	145.153.680.721	87	148.625.207.937	88	122.206.589.944	89	156.300.285.743	90	188.968.305.950	90	761.254.070.295	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase	57,47	83,18		90,82		100		100		100		100		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
																	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	Persentase	76,93	79,3		79,91		80,54		81,17		81,79		81,79		BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
																	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	0	3	1.000.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	31.320.126.583	13	34.321.126.583	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	0	1822	1.000.000.000	716	10.000.000	600	712.800.000	590	10.000.000	572	595.716.173	4300	2.328.516.173	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	18	108.000.000	18	108.000.000	18	108.000.000	18	108.000.000	18	108.000.000	18	540.000.000	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	0	533	39.034.369.290	612	43.809.745.983	653	48.608.895.960	687	53.059.535.325	701	55.605.095.746	701	240.117.642.304	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	0	1690	350.241.858	1715	369.562.740	1740	391.678.740	1790	419.208.940	1840	451.231.380	1840	1.981.923.658	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	0	3418	77.842.070.000	3420	77.902.070.000	3422	47.982.181.455	3424	78.022.070.000	3426	78.082.070.000	3426	359.830.461.455	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	DKI JAKARTA
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	8	234.075.000	15	306.710.000	20	328.785.000	25	350.860.000	30	372.935.000	30	1.593.365.000	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	180	105.755.000	240	153.110.000	270	175.185.000	270	175.185.000	270	175.185.000	270	784.420.000	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	0	2	56.300.000	2	56.300.000	2	56.300.000	2	56.300.000	2	56.300.000	2	281.500.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	DKI JAKARTA
1.01.02.2.03.0029	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	0	2	111.200.000	2	111.200.000	2	111.200.000	2	111.200.000	2	111.200.000	2	556.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	DKI JAKARTA
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	0	476	91.270.040	487	93.200.040	520	97.490.040	520	97.490.040	564	102.710.000	564	482.160.160	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	8	186.020.000	8	186.020.000	6	135.460.000	6	135.460.000	6	135.460.000	6	778.420.000	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	2400	2.116.065.000	2490	2.117.031.000	2520	2.142.311.000	2520	2.142.311.000	2520	2.142.311.000	2520	10.660.029.000	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	0	2070	6.413.762.026	967	3.710.139.832	620	3.401.904.569	537	3.397.514.581	532	3.594.654.939	532	20.517.975.947	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	0	163	16.504.552.507	163	16.718.396.340	163	16.954.398.180	163	17.215.150.857	189	16.115.310.129	168,2	83.507.808.013	SUKU DINAS PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	1	2.972.722.002	0	0	0	0	0	0	1	2.972.722.002	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rata-rata kompetensi Literasi SD Kesetaraan (Paket A) berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	60,9	62,9	112.379.877.917	63,9	73.309.331.878	64,9	104.075.210.718	65,9	122.544.990.183	66,9	118.262.372.692	66,9	530.571.783.388	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	DKI JAKARTA
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP Kesetaraan (Paket B) berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65,94	67,94		68,94		69,94		70,94		71,94		71,94		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA Kesetaraan (Paket C) berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,57	65,57		66,57		67,57		68,57		69,57		69,57		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SD Kesetaraan (Paket A) berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	46,75	48,75		49,75		50,75		51,75		52,75		52,75		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP Kesetaraan (Paket B) berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,91	60,91		61,91		62,91		63,91		64,91		64,91		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA Kesetaraan (Paket C) berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,16	57,16		58,16		59,16		60,16		61,16		61,16		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Keamanan SD Kesetaraan (Paket A)	Nilai	69,95	71,95		72,95		73,95		74,95		75,95		75,95		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Keamanan SMP Kesetaraan (Paket B)	Nilai	68,18	70,18		71,18		72,18		73,18		74,18		74,18		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Keamanan SMA Kesetaraan (Paket C)	Nilai	68,81	70,81		71,81		72,81		73,81		74,81		74,81		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Kebinekaan SD Kesetaraan (Paket A)	Nilai	63,96	65,96		66,96		67,96		68,96		69,96		69,96		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP Kesetaraan (Paket B)	Nilai	63,42	65,42		66,42		67,42		68,42		69,42		69,42		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA Kesetaraan (Paket C)	Nilai	64,46	66,46		67,46		68,46		69,46		70,46		70,46		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS	
																	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN	



### IV.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029, jumlah Program yang digunakan adalah 2 (dua), jumlah Kegiatan 14 (empat belas), dan jumlah Subkegiatan 161 (seratus enam puluh satu). Untuk pemetaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang mendukung ketercapaian Program Prioritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Peningkatan Harapan Lama Sekolah 2. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah 3. Peningkatan angka partisipasi anak usia sekolah: a. 5-6 tahun b. 7-15 tahun c. 16-18 tahun d. 4-18 tahun penyandang disabilitas e. 7-18 tahun anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini: a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD b. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD c. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD d. Pengelolaan Dana BOP PAUD e. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD f. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD g. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar: a. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) b. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah c. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah d. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah e. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar f. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah g. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar h. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik i. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah j. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama: a. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) b. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah c. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</li> <li>e. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</li> <li>f. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</li> <li>g. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</li> <li>h. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik</li> </ul> <p>4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)</li> <li>b. Pembangunan Asrama Sekolah</li> <li>c. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</li> <li>d. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</li> <li>e. Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah</li> <li>f. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas</li> <li>g. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</li> <li>h. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas</li> <li>i. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas</li> <li>j. Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah</li> <li>k. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik</li> </ul> <p>5. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)</li> <li>b. Pembangunan Asrama Sekolah</li> <li>c. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</li> <li>d. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan</li> <li>e. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</li> <li>f. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan</li> <li>g. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan</li> </ul>

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah</li> <li>i. Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik</li> </ul> <p>6. Pengelolaan Pendidikan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</li> <li>b. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</li> <li>c. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus</li> <li>d. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus</li> <li>e. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus</li> <li>f. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus</li> <li>g. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik</li> <li>h. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah</li> </ul> <p>7. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan</li> <li>b. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> <li>c. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</li> <li>d. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik</li> <li>e. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal</li> </ul>
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan rata-rata literasi dan numerasi pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan PKBM	<p>1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</li> <li>b. Pengembangan konten digital untuk pendidikan</li> <li>c. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan</li> <li>d. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>e. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li> </ul> <p>2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</li> </ul>

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pengembangan konten digital untuk pendidikan</li> <li>c. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan</li> <li>d. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>e. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li> </ul> <p>3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</li> <li>b. Pengembangan konten digital untuk pendidikan</li> <li>c. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan</li> <li>d. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>e. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li> </ul> <p>4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</li> <li>b. Pengembangan konten digital untuk pendidikan</li> <li>c. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan</li> <li>d. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>e. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li> </ul> <p>5. Pengelolaan Pendidikan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</li> <li>b. Pengembangan konten digital untuk pendidikan</li> <li>c. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li> <li>d. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> </ul> <p>6. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan konten digital untuk pendidikan</li> <li>b. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik</li> <li>d. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li> </ul>
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan indeks iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan PKBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan konten digital untuk pendidikan</li> <li>b. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>c. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li> <li>d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</li> <li>e. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan</li> <li>f. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</li> </ul> </li> <li>2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan konten digital untuk pendidikan</li> <li>b. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>c. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li> <li>d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</li> <li>e. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan</li> <li>f. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</li> </ul> </li> <li>3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan konten digital untuk pendidikan</li> <li>b. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>c. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li> <li>d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas</li> </ul> </li> </ul>

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan</li> <li>f. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</li> </ul> <p>4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan konten digital untuk pendidikan</li> <li>b. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>c. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li> <li>d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan</li> <li>e. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan</li> <li>f. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</li> </ul> <p>5. Pengelolaan Pendidikan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan konten digital untuk pendidikan</li> <li>b. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li> <li>c. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus</li> <li>e. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan</li> <li>f. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</li> </ul> <p>6. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan konten digital untuk pendidikan</li> <li>b. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>c. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li> </ul>

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan e. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan f. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
4	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Peningkatan Persentase Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi 2. Peningkatan Keterserapan Lulusan SMK	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan a. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik b. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan d. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan e. Pengembangan konten digital untuk pendidikan f. Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK g. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik h. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
5	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Peningkatan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi 2. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas

**IV.3 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN 2025-2029**

**IV.3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dalam menjalankan semua program dan kegiatan yang terdapat pada Dinas Pendidikan, harus diukur ketercapaian dari seluruh program dan kegiatan tersebut untuk memastikan apakah berdampak secara signifikan dalam mendorong upaya pembangunan pendidikan. Keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan dapat diukur melalui

Indikator Kinerja Utama yang telah selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta. IKU ini akan menjadi bahan evaluasi setiap tahun untuk menilai kinerja Dinas Pendidikan. Berikut IKU Dinas Pendidikan tahun 2026-2030:

Tabel 15 Indikator Kinerja Utama Dinas PendidikAN 2026-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,63	13,64	13,67	13,87	13,89	13,95
2	Persentase Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persentase	76,7	77,82	78,71	79,43	80,05	80,59
3	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11,53	11,7	11,85	12,23	12,27	12,3
4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persentase	19,08	19,2	19,5	20,1	21,52	21,6
5	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca	Persentase	83,33	83,33	83,33	83,33	100	100
6	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	Persentase	66,67	66,67	66,67	83,33	83,33	83,33
7	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca	Persentase	86,17	86,2	86,5	87,06	89,56	89,58
8	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	Persentase	77,63	78,4	78,6	78,73	81,23	81,25

### IV.3.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Dinas Pendidikan memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur kinerja yang lebih teknis dan operasional untuk menilai program yang telah ditetapkan. IKK disusun berdasarkan nomenklatur bidang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, selain itu terdapat 1 IKK yang berada diluar bidang urusan pendidikan kewenangan daerah yaitu perguruan tinggi. Hal ini dilakukan sebagai untuk



mendukung visi Jakarta sebagai Kota Global. Berikut IKK Dinas Pendidikan tahun 2026-2030:

Tabel 16 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan 2026-2030

No	Indikator Kinerja Kunci	Baseline	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
<b>Indikator Program Pengelolaan Pendidikan</b>							
1	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	79,95	81,23	81,87	82,51	83,16	83,8
2	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	47,84	51,03	52,63	54,22	55,82	57,42
3	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	89,98	91,68	92,53	93,38	94,22	95,07
4	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	79,62	85,24	88,16	90,95	93,35	95,53
5	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	98,98	99,35	99,49	99,63	99,69	99,74
6	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	85,88	85,9	86	86,3	86,5	86,7
7	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	78,19	78,5	78,7	78,9	79,1	79,3
8	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	18,37	26,68	30,84	35,06	39,17	43,26

No	Indikator Kinerja Kunci	Baseline	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	41,99	42,5	42,7	42,9	43,1	43,3

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 yang telah mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen ini akan menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan beserta seluruh unit perangkat teknis di bawah koordinasinya dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Melalui Rencana Strategis ini, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bersama jajarannya mendeskripsikan tugas dan fungsinya ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Pada akhirnya, semua hal tersebut merupakan upaya untuk mendukung pencapaian DKI Jakarta sebagai kota pusat ekonomi-bisnis berskala global.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan , dukungan masyarakat yang akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Rencana Strategis ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan.